



**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA PADA PENERAPAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAN STANDAR
AKUNTANSI PEMERINTAH SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Pada Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD di Kabupaten Situbondo)**

SKRIPSI

Oleh

**Yuninggar Galuh Kristaliahadi
130810301112**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2017**



**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA PADA PENERAPAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAN STANDAR
AKUNTANSI PEMERINTAH SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Pada Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD di Kabupaten Situbondo)**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi

Oleh

**Yuninggar Galuh Kristaliahadi
130810301112**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2017**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ayah dan mama tercinta, Mishadi Fariyanto dan Kristiani yang telah memberikan kasih sayang, bimbingan serta pengorbanan yang tiada henti sampai saat ini;
2. Ibu kedua saya, Alm. Endang Puji Lestari yang telah merawat dan mendidik saya hingga saya tumbuh menjadi gadis remaja;
3. Kedua saudara yang sangat saya sayangi, Bella Krisnansyahadi dan Jelita Rindu Kristriyahadi yang senantiasa memberikan semangat dan kasih sayang;
4. Pendamping hidupku kelak;
5. Almamater Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

MOTTO

Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum, kecuali mereka berusaha mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.

(QS. Ar Ra'ddah Ayat 11)

Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkan-Nya di hadapanmu. Kenalilah Allah di waktu senggang, niscaya Dia akan mengenalmu di waktu susah. Ketahuilah bahwa apa yang ditetapkan luput darimu, tidaklah akan menimpamu. Dan apa yang ditetapkan akan menimpamu, tidak akan luput darimu. Ketahuilah bahwa kemenangan itu bersama kesabaran, dan kemudahan itu bersama kesulitan, dan bersama kesulitan ada kemudahan”

(HR. Tirmidzi)

Cara untuk menjadi didepan adalah memulai sekarang. Jika memulai sekarang, tahun depan Anda akan tahu banyak hal yang sekarang tidak diketahui, dan Anda tak akan mengetahui masa depan jika Anda menunggu-nunggu

(William Feather)

Daun yang jatuh tak pernah membenci angin. Dia membiarkan dirinya jatuh begitu saja. Tak melawan. Mengikhlaskan semuanya.

(Tere Liye)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yuninggar Galuh Kristaliahadi

NIM : 130810301112

Konsentrasi : Akuntansi Pemerintahan

Judul : Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Standar Akuntansi Pemerintah Serta Implikasinya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD Di Kabupaten Situbondo)

Menyatakan bahwa skripsi yang telah saya buat adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali apabila dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi mana pun. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 26 April 2017

Yang menyatakan,

Yuninggar Galuh Kristaliahadi
NIM 130810301112

SKRIPSI

**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA PADA PENERAPAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAN STANDAR
AKUNTANSI PEMERINTAH SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Pada Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD di Kabupaten Situbondo)**

Oleh

Yuninggar Galuh Kristaliahadi

NIM 130810301112

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Andriana, S.E., M.Sc.

Dosen Pembimbing Anggota : Drs. Djoko Supatmoko, MM., Ak.

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul skripsi : PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
PADA PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DAN STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAH SERTA IMPLIKASINYA
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH (Studi Pada Pejabat Penatausahaan
Keuangan SKPD di Kabupaten Situbondo)

Nama Mahasiswa : Yuninggar Galuh Kristaliahadi

N I M : 130810301112

Jurusan : S1 AKUNTANSI

Tanggal Persetujuan: 30 Maret 2017

Pembimbing I

Pembimbing II,

Andriana, SE.,M.Sc.
NIP. 19820929 201012 2 002

Drs. Djoko Supatmoko, MM.,Ak.
NIP. 19550227 198403 1 001

Ketua Program Studi
S1 Akuntansi

Dr. Yosefa Sayekti, M. Com., Ak.
NIP. 19640809 199003 2 001

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI

**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA PADA PENERAPAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAN STANDAR
AKUNTANSI PEMERINTAH SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Pada Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD Di Kabupaten Situbondo)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Yuninggar Galuh Kristaliahadi

NIM : 130810301112

Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

2 MEI 2017

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua : Dr. Whedy Prasetyo, S.E., M.SA., Ak. (.....)
NIP. 197705232008011012

Sekretaris : Drs. Sudarno, M.Si., Ak. (.....)
NIP. 196012251989021001

Anggota : Aisa Tri Agustini, S.E., M.Sc. (.....)
NIP. 198808032014042002



Mengetahui/Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi
Dekan,

Dr. Muhammad Miqdad, S.E., MM., Ak.
NIP. 197107271995121001

ABSTRAK

Yuninggar Galuh Kristaliahadi

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Jember

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan SPIP dan SAP serta implikasinya terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada satuan kerja perangkat daerah di kabupaten Situbondo. Penelitian dilaksanakan pada seluruh pejabat penatausahaan keuangan satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Situbondo dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari kuesioner yang disebarakan kepada responden. Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah *purposive sampling*, sehingga diperoleh sebanyak 43 responden. Analisis data menggunakan SPSS versi 23 melalui metode statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, uji hipotesis yang terdiri dari uji t, uji F, analisis jalur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi Sumber Daya Manusia, penerapan SPIP dan SAP memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kata Kunci : Kualitas Laporan Keuangan, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan SPIP dan Penerapan SAP

ABSTRACT

Yuninggar Galuh Kristaliahadi

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember

This study examines the effect of human resources competencies in the application of government internal control system and government accounting standards as well as the implications on the quality of financial statements. The populations on this study are all financial administration at Regional Work Unit in Regency Situbondo. The method used in the sampling is purposive sampling and obtained of 43 respondents. Analysis of data using SPSS version 23 through descriptive statistic, Test data quality, Classic Assumption Test, Testing Hypotheses consisting of F test, t test and path analysis. The results of this study indicate that the competence of human resources, the application of internal control system and government accounting standards have a positif influence on the quality of the financial statement either directly or indirectly.

Keywords: *Quality of financial statement, Human Resource Competencies, Implementation of SPIP and SAP*

RINGKASAN

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Standar Akuntansi Pemerintah Serta Implikasinya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD di Kabupaten Situbondo); Yuninggar Galuh Kristaliahadi, 130810301112; 2017; 89 halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jember.

Pemerintah dituntut untuk melaksanakan akuntabilitas publik. Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pencapaian kegiatan dan program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah. Bentuk dari pertanggungjawaban yang harus dilakukan pemerintah yaitu dengan menyajikan laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010. Penelitian mengenai laporan keuangan masih menarik untuk dilakukan karena sampai dengan audit tahun 2016 laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang belum memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian sebanyak 42% dari 533 LKPD tahun 2015. Perubahan yang harus dilakukan untuk dapat memperbaiki kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dimulai dari peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan penggerak dalam suatu organisasi. Apabila sumber daya manusia yang dimiliki memiliki kompetensi yang tinggi tentu akan meningkatkan kualitas dari LKPD yang dihasilkan. Faktor lain yang juga mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu penerapan SPIP dan SAP. Penerapan SPIP dan SAP perlu diterapkan dengan baik dikarena dalam pemberian opini, terdapat kriteria yang digunakan BPK yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi, kecukupan pengungkapan, kepatuhan ketentuan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Maka dari itu penerapan SPIP dan SAP yang baik akan meningkatkan kualitas dari laporan keuangan pemerintah daerah. Untuk dapat menerapkannya dengan baik, diperlukannya kompetensi sumber

daya manusia yang baik pula, dengan begitu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan mengalami peningkatan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo pada tahun 2015 mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP), kondisi ini bukan merupakan suatu hasil yang maksimal serta mengindikasikan bahwa masih banyak kelemahan dalam pencatatan dan pelaporan keuangan daerah yang perlu diperbaiki baik itu dari aspek kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan standar akuntansi pemerintah (SAP). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai pengaruh kompetensi SDM pada penerapan SPIP dan SAP serta implikasinya pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini dilakukan di SKPD Kabupaten Situbondo. Penentuan sampel mana saja yang akan dipilih adalah dengan menggunakan pemilihan sampel bertujuan (*Purposive Sampling*). Kriteria sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang memiliki masa kerja minimal 1 tahun. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari responden yaitu Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD dari masing-masing SKPD di Kabupaten Situbondo. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menyebarkan kuisioner dan menggunakan *Skala Likert* dalam pengisiannya.

Hasil dari penelitian ini adalah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif pada penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Standar Akuntansi Pemerintah serta berdampak terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa Kompetensi SDM yang tinggi juga dapat berpengaruh secara langsung dengan arah positif terhadap kualitas LKPD. Semakin tinggi kompetensi yang dimiliki sumber daya manusia maka akan semakin baik pula penerapan SPIP dan SAP, sehingga ada kecenderungan LKPD yang dihasilkan akan berkualitas.

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Standar Akuntansi Pemerintah serta Implikasinya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Situbondo). Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, kesabaran, dan segalanya. Terimakasih atas rahmat, ridho, dan kehendakMu-lah akhirnya saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik;
2. Dr. Muhammad Miqdad, S.E.,MM.,Ak selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis;
3. Andriana, S.E., M.Sc. selaku Dosen Pembimbing Utama, serta Drs. Djoko Supatmoko, MM., Ak. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini;
4. Taufik Kurrohman SE, M.Si, Ak. selaku Dosen Pembimbing Akademik;
5. Dosen-dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yang telah mengajarkan ilmu pengetahuannya selama penulis berada di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jember;
6. Ayah dan mama tercinta, Mishadi Fariyanto dan Kristiani yang telah memberikan kasih sayang, bimbingan serta pengorbanan yang tiada henti sampai saat ini;
7. Ibu kedua saya, Alm. Endang Puji Lestari yang telah merawat dan mendidik saya hingga saya tumbuh menjadi gadis remaja;

8. Kedua saudara yang sangat saya sayangi, Bella Krisnansyahadi dan Jelita Rindu Kristriyahadi yang senantiasa memberikan semangat;
9. Seluruh kepala beserta pegawai SKPD Pemkab Situbondo yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian ini;
10. Teman-teman seperjuangan, Bariro, Alifia Avirista, Levi Revania, Siti Purwati, Fita yang selalu memberikan semangat dan motivasi disaat susah maupun senang;
11. Teman-teman Akuntansi 2013, Nancy, Ebtisam, Dwi, dll. yang sejak awal berjuang bersama-sama;
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 26 April 2017

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
HALAMAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	vii
HALAMAN PENGESAHAN.....	viii
ABSTRAKSI.....	ix
ABSTRACT	x
RINGKASAN	xi
PRAKATA.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Landasan Teori	11
2.1.1 Pentingnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	11
2.1.2 Laporan Keuangan	12

2.1.2.1 Pengertian Laporan Keuangan	12
2.1.2.2 Komponen Laporan Keuangan.....	12
2.1.2.3 Kualitas Laporan Keuangan	14
2.1.2.4 Faktor-faktor yang memengaruhi Laporan Keuangan.....	15
2.1.3 Kompetensi Sumber Daya Manusia	15
2.1.4 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah	17
2.1.5 Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	22
2.1.5.1 Pengertian SPIP	22
2.1.5.2 Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.....	23
2.2 Penelitian Terdahulu	24
2.3 Kerangka Konseptual.....	27
2.4 Pengembangan Hipotesis	29
2.4.1 Pengaruh Kompetensi SDM terhadap penerapan SPIP	29
2.4.2 Pengaruh Kompetensi SDM terhadap penerapan SAP	31
2.4.3 Pengaruh Kompetensi SDM terhadap Kualitas LKPD	32
2.4.4 Pengaruh penerapan SPIP terhadap kualitas LKPD	33
2.4.5 Pengaruh Penerapan SAP terhadap kualitas LKPD	34
2.4.6 Pengaruh Kompetensi SDM terhadap kualitas LKPD melalui penerapan SPIP	35
2.4.7 Pengaruh Kompetensi SDM terhadap kualitas LKPD melalui penerapan SAP	36
BAB III METODE PENELITIAN	38
3.1 Rancangan Penelitian	38
3.2 Lokasi Penelitian.....	38
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	38
3.4 Populasi dan Sampel.....	39

3.5 Teknik Pengumpulan Data	39
3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	40
3.6.1 Variabel Penelitian.....	40
3.6.2 Definisi Operasional.....	40
3.7 Analisis Data.....	43
3.7.1 Statistik Deskriptif.....	44
3.7.2 Uji Kualitas Data	44
3.7.3 Uji Asumsi Klasik	45
3.7.4 Uji Hipotesis.....	47
3.8 Kerangka Pemecahan Masalah	48
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	49
4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian.....	49
4.2 Statistik Deskriptif.....	50
4.2.1 Statistik Deskriptif Data Responden	50
4.2.2 Statistik Deskriptif Jawaban Responden	50
4.3 Analisis Data.....	61
4.3.1 Uji Kualitas Data	61
4.3.1.1 Uji Validitas	61
4.3.1.2 Uji Reliabilitas.....	64
4.3.2 Uji Asumsi Klasik	65
4.3.2.1 Uji Normalitas	65
4.3.2.2 Uji Multikolinearitas	66
4.3.2.3 Uji Heteroskedastisitas	67
4.3.3 Uji Hipotesis.....	67
4.3.3.1 Uji F.....	67
4.3.3.2 Uji t.....	68
4.3.3.3 Analisis Jalur (<i>Path Analysis</i>)	71

4.4 Pembahasan.....	75
4.4.1 Pengaruh Kompetensi SDM Terhadap Penerapan SPIP ...	75
4.4.2 Pengaruh Kompetensi SDM Terhadap Penerapan SAP....	76
4.4.3 Pengaruh Kompetensi SDM Terhadap Kualitas LKPD	77
4.4.4 Pengaruh Penerapan SPIP Terhadap Kualitas LKPD	78
4.4.5 Pengaruh Penerapan SAP Terhadap Kualitas LKPD	78
4.4.6 Pengaruh Kompetensi SDM Terhadap Kualitas LKPD Melalui Penerapan SPIP	79
4.4.7 Pengaruh Kompetensi SDM Terhadap Kualitas LKPD Melalui Penerapan SAP.....	80
BAB V Penutup	82
5.1 Kesimpulan.....	82
5.2 Keterbatasan	84
5.3 Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN.....	90

DAFTAR TABEL

	Halaman
2.1 Penelitian Terdahulu.....	25
4.1 Penyebaran dan Pengembalian Kuisisioner	51
4.2 Deskriptif Responden	51
4.3 Kategori Rata-Rata Jawaban Responden.....	53
4.4 Kategori Rata-rata Jawaban Responden untuk variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	53
4.5 Kategori Rata-rata Jawaban Responden untuk variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia	55
4.6 Kategori Rata-rata Jawaban Responden untuk variabel SPIP	57
4.7 Kategori Rata-rata Jawaban Responden untuk variabel SAP.....	59
4.8 Hasil Uji Validitas	62
4.9 Hasil Uji Reliabilitas.....	65
4.10 Hasil Uji Normalitas	66
4.11 Hasil Uji Multikolinieritas	66
4.12 Hasil Uji F	68
4.13 Hasil Uji T	68
4.14 Analisis Jalur Pengaruh Langsung.....	72
4.15 Analisis Jalur Pengaruh Tidak Langsung	73
4.16 Analisis Jalur Pengaruh Total.....	74

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1.1 Opini LKPD Kabupaten Situbondo.....	7
2.1 Kerangka Konseptual.....	29
3.1 Kerangka Pemecahan Masalah	48
4.1 Peta Wilayah Kabupaten Situbondo	50
4.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas	67
4.3 Model Analisis Jalur (<i>Path Analysis</i>)	72

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuisisioner

Lampiran 2 Data Populasi

Lampiran 3 Rekapitulasi Jawaban Responden

Lampiran 4 Statistik Deskriptif

Lampiran 5 Uji Validitas dan Reliabilitas

Lampiran 6 Uji Asumsi Klasik

Lampiran 7 Uji F

Lampiran 8 Uji t

Lampiran 9 R tabel

Lampiran 10 T tabel

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tuntutan masyarakat akan pemerintahan yang baik (*good government governance*), dapat mendorong pemerintah untuk melaksanakan akuntabilitas public. Akuntabilitas menjadi suatu kewajiban untuk melaporkan serta mempertanggungjawabkan pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pemerintah. Akuntabilitas bukan hanya menyangkut proses, kinerja, dan manajemen, akan tetapi juga menyangkut pengelolaan keuangan dan kualitas output, serta akuntabilitas keuangan dapat diukur dari semakin kecilnya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan pemerintah (Riswanto, 2016). Bentuk dari pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, sebagai upaya dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah sebagaimana hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Setiap satuan kerja termasuk juga pemerintah daerah dituntut atau diwajibkan menyajikan laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan yang berkualitas menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 adalah laporan keuangan yang memiliki karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan serta dapat dipahami. *Relevan* yaitu informasi yang memuat didalamnya dapat memengaruhi keutusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. *Andal* yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. *Dapat dibandingkan* yang artinya informasi yang tersaji dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain

pada umumnya. *Dapat dipahami* dengan arti informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai mengenai kegiatan dan lingkungan operasi suatu entitas, dan para pengguna memiliki kemauan untuk mempelajari informasi yang dimaksud (PP No.71, 2010).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah untuk mengetahui kualitas dari laporan tersebut. Proses pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK ini merupakan suatu bentuk dari penerapan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. Hasil akhir (output) dari pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dinyatakan dalam bentuk pemberian opini. Menurut UU Nomor 15 Tahun 2004 penjelasan pasal 16 ayat 1, opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Kriteria pemberian opini, adalah: kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Opini BPK disajikan dalam 4 bentuk yaitu wajar tanpa pengecualian (WTP) termasuk wajar tanpa pengecualian dengan paragraph penjelas (WTP-DPP), wajar dengan pengecualian (WDP) tidak wajar (TW) dan tidak memberikan pendapat (TMP). Indikator bahwa laporan keuangan pemerintah daerah sudah berkualitas yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Adhi, Suhardjo, 2013).

Data berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2016 mengungkapkan hasil pemeriksaan atas 533 (98%) LKPD Tahun 2015 dari 542 pemerintah daerah yang wajib menyerahkan LKPD Tahun 2015. Atas 533 LKPD Tahun 2015 tersebut, BPK memberikan 312 opini WTP (58%), 187 opini WDP (35%), 30 opini TMP (6%), dan 4 opini TW (1%). Atas 221 LKPD yang belum memperoleh opini WTP umumnya disebabkan

masih adanya kelemahan dalam penyajian laporan keuangan sesuai dengan SAP. Terdapat permasalahan yang paling dominan yang memengaruhi opini LKPD tidak WTP, yaitu Aset Tetap, antara lain aset tetap tanah untuk gedung dan bangunan, jalan dan saluran irigasi belum dicatat; Beban-LO, antara lain kesalahan penganggaran yang tidak dapat dikoreksi ke Beban-LO sehingga penyajian Beban – LO tidak dapat diukur dengan tepat, Belanja Daerah antara lain belanja hibah dan belanja bantuan sosial direalisasikan untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan tujuannya. (IHPS I, 2016).

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya kompetensi sumber daya manusia (SDM), penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan standar akuntansi pemerintahan (SAP) yang dijadikan sebagai kriteria penilaian BPK atas kewajaran informasi yang tersaji pada laporan keuangan pemerintah daerah. Maka dari itu, laporan keuangan yang disajikan harus berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan SAP. Pengendalian intern terdiri dari kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk manajemen bahwa tujuan dan sasaran organisasi telah dicapai. Standar akuntansi prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Faktor terpenting untuk dapat menciptakan laporan keuangan yang berkualitas yaitu sumber daya manusia, dikarenakan SDM yang menerapkan SPIP dan SAP. Sebaik apapun suatu sistem dan standar akan menjadi percuma jika tidak ditunjang oleh kompetensi SDM yang memadai, terdiri dari pengetahuan, keterampilan dan perilaku SDM yang bersangkutan. Menurut Simanjuntak (2005:72) dalam Sudiarianti (2015) dikatakan bahwa penyiapan dan penyusunan laporan keuangan memerlukan SDM yang memiliki kompetensi serta menguasai akuntansi pemerintahan. Apabila SDM berkompeten, maka dapat meminimalisir kesalahafsiran dalam memahami prinsip-prinsip akuntansi yang tertuang dalam SAP serta dapat menerapkan SPIP dengan baik. Sumber daya manusia dengan kompetensi yang dimilikinya akan mampu menyelesaikan tugas dan fungsinya secara optimal begitu juga dalam hal penerapan SPIP dan pemahaman terkait SAP,

sehingga dapat menjadi penyangga atas tersusunnya laporan keuangan yang berkualitas.

Tuntutan perbaikan yang dilakukan dalam kaitannya dengan peningkatan kualitas laporan keuangan harus dimulai dengan perbaikan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Kompetensi Sumber Daya Manusia adalah kemampuan seseorang atau individu suatu organisasi (kelembagaan) atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien (Ihsanti,2014). Sebaik apapun sistem pada suatu instansi namun jika yang menjalankannya tidak memiliki kompetensi yang memadai maka akan menjadi percuma. Sumber Daya Manusia bila diibaratkan sebagai kendaraan maka SDM merupakan rodanya,hal ini dikarenakan SDM dengan kemampuan,pengetahuan yang dimiliki dapat menjadi penggerak dalam sebuah instansi. Apabila suatu instansi mampu memiliki sumber daya manusia yang berkualitas,maka hal ini akan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Oleh karena itu, menurut (Rahayu,Kennedy.2014) laporan keuangan daerah harusnya dikelola oleh SDM dengan latar belakang pendidikan akuntansi,jika tidak maka akan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Sumber daya manusia merupakan human capital di dalam organisasi. Human capital merupakan pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan kapabilitas untuk berkembang dan berinovasi yang dimiliki manusia dalam suatu organisasi (Baron & Amstrong,2013:5). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Zuliarti (2012) mengenai kapabilitas sumber daya manusia terhadap kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapabilitas SDM tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Temuan empiris dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai subbagian akuntansi/tata usaha keuangan tidak berasal dari latar belakang pendidikan akuntansi,job description belum terspesifikasi dengan jelas. Akan tetapi, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Winidyaningrum dan Rahmawati (2010),Nurillah (2014),yang menyimpulkan bahwa kompetensi SDM berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan.

Hal kedua yang mungkin memengaruhi kualitas laporan keuangan adalah system pengendalian intern, dalam menyajikan laporan keuangan harus sesuai dengan SPI yang memadai. Sistem pengendalian intern menurut PP nomor 60 Tahun 2008 adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengendalian internal dibangun dari lima unsur sebagai berikut: (a) lingkungan pengendalian; (b) penilaian risiko; (c) aktivitas pengendalian; (d) informasi dan komunikasi; serta (e) pemantauan pengendalian intern (PP Nomor 60 tahun 2008). Menurut Susilawati dan Riana (2014) pengaruh antara sistem pengendalian intern dan kualitas LKPD yaitu sistem pengendalian intern meliputi berbagai alat manajemen yang bertujuan menjamin kepatuhan terhadap hukum dan perundangan, menjamin keandalan laporan keuangan dan data keuangan, memfasilitasi efisiensi dan efektivitas operasi pemerintah, sehingga pengendalian intern dapat memenuhi keakuratan data informasi dalam penyusunan LKPD.

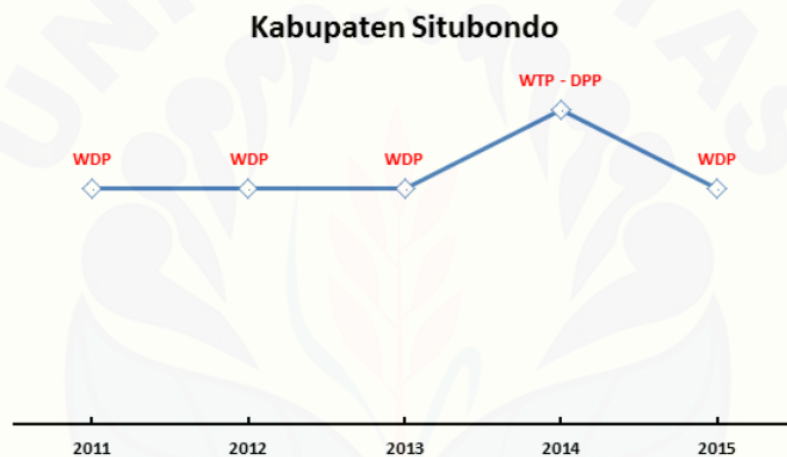
Data hasil pemeriksaan BPK atas 533 LKPD menunjukkan terdapat 6.150 kelemahan SPI yang terdiri dari permasalahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan kelemahan struktur pengendalian intern (IHPS 1, 2016). Permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern pada umumnya terjadi karena pejabat/pegawai yang bertanggung jawab lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian, kurang koordinasi antar pejabat terkait, belum membuat kebijakan/prosedur untuk suatu kegiatan operasional, serta belum menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK tahun sebelumnya (IHSP 1, 2016).

Faktor lainnya yang mungkin mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Standar Akuntansi

Pemerintah (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Menurut Hariadi, (2010:113) Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Standar Akuntansi Pemerintah dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP). Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintah yang tertuang dalam PP Nomor 71 tahun 2010 menerapkan basis akrual, dan diterapkan yang selambat-lambatnya pada tahun 2015. Dengan diterapkannya basis akrual diharapkan dapat memaksimalkan pengelolaan keuangan negara dan daerah, pemerintah menerapkan akuntansi berbasis akrual. Hal ini sebagai bentuk pertanggungjawaban pemda dalam pengelolaan keuangan daerah. Standar akuntansi menjadi kriteria audit bagi auditor sebagai dasar untuk menilai apakah laporan keuangan sudah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Menurut Zeyn (2011) pada penelitiannya mengenai standar akuntansi pemerintahan terhadap akuntabilitas keuangan, mengatakan “penerapan SAP oleh pemerintah daerah akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan mengandung informasi yang berguna“. Hal tersebut juga diperkuat dengan penelitian yang dilakukan Komaruddin (2014) menyimpulkan bahwa “standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, (abdul halim, 2010:94) memperkuat hasil penelitiannya dengan teori yang mengatakan penerapan SAP memberikan memberikan pedoman kepada Pemda dalam meningkatkan kredibilitas laporan keuangannya”.

Penelitian mengenai ini, penting untuk dilakukan mengingat masih banyak LKPD yang tidak dapat mencapai opini WTP. Seperti yang telah diungkap, opini WTP menunjukkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dianggap berkualitas. Selain itu, untuk mencapai opini WTP perlu SDM yang berkompeten supaya tidak terjadi kesalahpahaman dalam penerapan SPIP dan SAP. Namun, kompetensi yang dimiliki sumber daya manusia dalam menerapkan SPIP dan SAP masih tergolong rendah. Hal tersebut yang juga menjadi penghalang dalam memperoleh opini WTP dari pemeriksaan yang dilakukan BPK.

Obyek dalam penelitian ini adalah Kabupaten Situbondo. Alasan penulis melakukan penelitian pada Kabupaten Situbondo, dikarenakan Kabupaten Situbondo merupakan kabupaten yang masih memperoleh opini WDP dari hasil pemeriksaan BPK tahun 2016 untuk LKPD tahun 2015. Hasil pemeriksaan ini kembali memperoleh opini WDP. Setelah 3 tahun berturut-turut LKPD Kab. Situbondo memperoleh Opini WDP, namun pada LKPD Ta 2014 Pemkab Situbondo menunjukkan perubahannya dengan mendapatkan opini WTP-DPP. Namun hasil pemeriksaan BPK untuk LKPD Ta 2015 Kab. Situbondo mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan hasil pemeriksaan tahun sebelumnya.



Sumber: surabaya.bpk.go.id

Gambar 1.1

Opini LKPD Kabupaten Situbondo

Permasalahan yang menjadi opini yang diberikan BPK atas LKPD TA 2015 tidak sesuai dengan yang diharapkan dan kembali memperoleh opini WDP atas LKPD TA 2015 yaitu adanya pengecualian yang dilaporkan BPK, diantaranya saldo Ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir Ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (pp 71,2010),namun pada hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK untuk LKPD Pemkab Situbondo, nilai ekuitas akhir pada laporan perubahan ekuitas dan neraca mengalami perbedaan. Untuk permasalahan yang kedua terkait dengan

dana BOS, dimana hasil pemeriksaan BPK, belum disajikannya dana BOS sebesar Rp 65 Miliar dalam LKPD TA 2015.

Penelitian yang dilakukan penulis ini mereplikasi penelitian Sudiarianti (2015) yang menggunakan kompetensi SDM, penerapan SPIP dan SAP untuk mengukur implikasinya terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dimana pada penelitian Sudiarianti (2015) menggunakan kualitas SDM sebagai variable independen, penerapan SPIP dan SAP sebagai variable pemediasi dan kualitas laporan keuangan sebagai variable dependen, serta *Partial Least Square* (PLS) sebagai alat analisis data. Penelitian yang dilakukan oleh Sudiarianti (2015) meneliti pada Kabupaten Tabanan, Bali. Perbedaan penelitian Sudiarianti (2015) dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu hanya terletak pada obyek penelitian. Penulis melakukan penelitian pada Kabupaten Situbondo. Pada penelitian ini juga menggunakan variabel kualitas SDM sebagai variable independen, penerapan SPIP dan SAP sebagai variable pemediasi dan kualitas laporan keuangan sebagai variable dependen, serta analisis jalur (*Path Analysis*) sebagai alat analisis data. Instrumen penelitian yang digunakan dalam memperoleh data dimodifikasi dari kuesioner Sudiarianti (2015), namun pada kuesioner terkait SAP, penulis melakukan pengembangan yaitu setiap pertanyaan disesuaikan dengan penerapan SAP berbasis aktual. Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan pada penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

- 1) Apakah kompetensi SDM berpengaruh terhadap penerapan SPIP?
- 2) Apakah kompetensi SDM berpengaruh terhadap penerapan SAP?
- 3) Apakah kompetensi SDM berpengaruh terhadap kualitas LKPD?
- 4) Apakah penerapan SPIP berpengaruh terhadap kualitas LKPD?
- 5) Apakah penerapan SAP berpengaruh terhadap kualitas LKPD?

- 6) Apakah kompetensi SDM berpengaruh terhadap kualitas LKPD melalui penerapan SPIP?
- 7) Apakah kompetensi SDM berpengaruh pada kualitas LKPD melalui penerapan SAP?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut.

- 1) Untuk menganalisis pengaruh kompetensi SDM terhadap penerapan SPIP di Pemkab Situbondo.
- 2) Untuk menganalisis pengaruh kompetensi SDM terhadap penerapan SAP di Pemkab Situbondo.
- 3) Untuk menganalisis pengaruh kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan Pemkab Situbondo.
- 4) Untuk menganalisis pengaruh penerapan SPIP terhadap kualitas LKPD Pemkab Situbondo.
- 5) Untuk menganalisis pengaruh penerapan SAP terhadap kualitas LKPD Pemkab Situbondo.
- 6) Untuk menganalisis pengaruh kompetensi SDM terhadap kualitas LKPD Pemkab Situbondo melalui penerapan SPIP.
- 7) Untuk menganalisis pengaruh kompetensi SDM terhadap kualitas LKPD Pemkab Situbondo melalui penerapan SAP.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Aspek teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam menganalisis peningkatan kualitas LKPD yang berkaitan dengan kompetensi SDM, penerapan SPIP dan SAP. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya, khususnya mengenai pengaruh kompetensi SDM pada penerapan SPIP dan SAP

serta implikasinya terhadap kualitas LKPD.

2. Aspek praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada Pemkab Situbondo dalam menentukan kebijakan yang akan dilaksanakan sehubungan dengan peningkatan kualitas LKPD yang berkaitan dengan pengaruh kompetensi SDM pada penerapan SPIP dan SAP serta implikasinya terhadap kualitas LKPD.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pentingnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Mahmudi (2016:2) mengungkapkan bahwa tegaknya perekonomian suatu negara adalah dengan adanya akuntabilitas dari pemangku kekuasaan. Istilah lainnya dari akuntabilitas tersebut adalah “amanah” yang berarti pemangku kekuasaan yang akuntabel atau amanah adalah mereka yang dipercaya dan bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya publik yang dipercayakan kepadanya. Terkait dengan tugas untuk menegakkan akuntabilitas keuangan khususnya di daerah, pemerintah daerah bertanggungjawab untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada pemangku kepentingannya. Terdapat dua alasan mengapa pemerintah daerah perlu mempublis laporan keuangan, yaitu :

1. Dari sisi internal, laporan keuangan merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja bagi pemerintah daerah secara keseluruhan maupun unit-unit kerja didalamnya (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban internal (internal accountability), yaitu pertanggungjawaban kepala satuan kerja kepada kepala daerah, kepala daerah kepada pegawai pemerintah daerah dan DPRD.
2. Dari sisi pemakai eksternal, laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban ekonomi, yaitu pertanggungjawaban kepala daerah kepada masyarakat, investor, kreditur, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan laporan keuangan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik.

Laporan keuangan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, maka laporan keuangan pemerintah daerah harus disajikan tepat waktu dan dapat diandalkan. Selain itu, laporan keuangan pemerintah daerah tersebut perlu dilengkapi dengan pengungkapan yang memadai (disclosure) mengenai informasi-informasi yang dapat mempengaruhi keputusan.

2.1.2 Laporan Keuangan

2.1.2.1 Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya ekonomi yang dimiliki entitas. Laporan keuangan harus disusun sesuai dengan standar akuntansi, hal ini supaya laporan keuangan dapat dibandingkan, dan bagi pembaca laporan keuangan tidak salah dalam menafsirkan. Bagi pemerintah, tujuan laporan keuangan untuk menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi keefektifan manajemen sumber daya dalam mencapai tujuan organisasi terutama bersifat nonmoneter (Belkaoui, 2000:132)

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

2.1.2.2 Komponen Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang harus dihasilkan pemerintah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, neraca, Laporan operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

2.1.2.3 Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas laporan keuangan merupakan persyaratan normative yang harus dipenuhi dalam penyusunan laporan keuangan agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan tersebut (Irwan, 2011). Laporan keuangan dikatakan berkualitas jika memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yang terdapat dalam PP Nomor 71 tahun 2010. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya (PP 71, 2010). Keempat karakteristik berikut merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yakni :

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan :

- (1) memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), yaitu informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi di masa lalu.
- (2) memiliki manfaat prediktif (*predictive value*), yaitu informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
- (3) tepat waktu, yakni informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
- (4) lengkap, yakni informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi dapat dicegah.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

- (1) Penyajian jujur, artinya informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
- (2) Dapat diverifikasi, artinya informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
- (3) Netralitas, artinya

informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

2.1.2.4 Faktor-faktor yang memengaruhi Laporan Keuangan

Macmillan (2003) menyatakan bahwa untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah dibutuhkan sumber daya dan arahan yang terdiri dari: pernyataan konsep akuntansi (*statements of accounting concepts*), pernyataan standar akuntansi (*statements of accounting standards*), kebijakan akuntansi (*accounting policies*), petunjuk, pelatihan, bahan-bahan dan tulisan (*manuals, training materials, and text*), petunjuk laporan keuangan (*financial statement instruction*), akuntan yang memiliki kompetensi dan profesional (*accountants with the competence and the professional*), kemampuan dalam teknologi informasi (*capabilities in information technology*), hukum dan peraturan yang terkait dengan laporan keuangan (*laws and regulations related to financial reporting*), hubungan dengan asosiasi dan badan akuntansi internasional (*links to international accounting bodies and associations*).

Salah satu dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang telah mengatur mengenai bentuk dan isi

laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, yang mana dalam penyusunan dan penyajiannya sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang telah ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Standar Akuntansi Pemerintah merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Noerdiawan (2009:123) menyatakan bahwa penerapan SAP akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat maupun daerah. Maka dari itu untuk dapat menerapkan SAP dengan baik, diperlukannya SDM yang berkompeten. Apabila kompetensi yang dimiliki SDM lemah/kurang akan berakibat pada kesalahan dalam penerapan SAP, sehingga akan berdampak pada kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Faktor lain yang juga berpengaruh yaitu Sisem Pengendalian Intern Pemerintah. Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006 menyebutkan SPIP adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah. Kesimpulan yang diperoleh yaitu laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya: kompetensi SDM, kualitas penerapan SPIP serta SAP.

2.1.3 Kompetensi Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia sebagai penggerak dalam suatu organisasi, baik itu organisasi pemerintahan maupun organisasi non pemerintahan. Tentu dalam hal ini sumber daya manusia yang dimiliki harus memiliki kompetensi. Menurut Rahayu et al.(2014) mengatakan Sumber Daya Manusia merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan peranannya sebagai manusia yang adaptif dan transformative yang ammpu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan.

Dalam buku (Marwansyah,2016:35-36) tentang Manajemen Sumber Daya Manusia, mendefinisikan kompetensi sebagai berikut :

“Competency refers to the knowledge, skills, personality characteristic, and attitude that make it possible for employees to perform work tasks and roles” (kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, karakteristik kepribadian, dan sikap yang memungkinkan karyawan untuk menjalankan tugas-tugas dan peran-peran dalam pekerjaannya).

“ Competency are characteristics that individuals have and use in appropriate, consistent ways in order to achieve desired performance. These characteristics include knowledge, skills, aspects of self-image, social motives, traits, thought patterns, mind-sets, and ways of thinking, feeling, and acting” (kompetensi adalah karakteristik yang dimiliki seseorang dan digunakan secara tepat dan konsisten untuk mewujudkan kinerja yang diharapkan. Karakteristik ini meliputi pengetahuan, keterampilan, aspek-aspek citra diri, motif-motif social, sifat-sifat, pola pikir, mind-set, dan cara berfikir, merasa dan bertindak).

Surat Keputusan Kepala BKN Nomor 46A 2003 menyatakan, Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara professional, efektif, efisien. Sedangkan Menurut (Havei, 2013) dalam (Nurillah, 2014) mengatakan kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan (skill), pengetahuan (knowledge), dan kemampuan (ability) untuk melaksanakan suatu pekerjaan. (Guy et al. 2002) dalam (Sukmaningrum, 2012) juga mengungkapkan bahwa kompetensi adalah pengetahuan dan kemampuan yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu tugas.

Menurut Spencer and Spencer (1993:19) dalam buku Sedarmayanti (2016:21) tentang Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menyatakan kompetensi memiliki karakteristik :

1. Motives: sesuatu yang secara konsisten dipikirkan oleh seseorang sehingga ia melakukan tindakan.
2. Traits: Watak yang mempengaruhi bagaimana seseorang merespon berbagai informasi dan situasi dan berperilaku dengan cara tertentu.

3. Self Concept: sikap, nilai dan citra diri yang dimiliki seseorang.
4. Knowledge: informasi/pengetahuan yang dimiliki seseorang untuk bidang tertentu.
5. Skills: kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas fisik tertentu (tugas mental tertentu).

Pernyataan tersebut sejalan dengan Robbins (2016:35-37) yang menyatakan bahwa kemampuan merujuk ke kapasitas individu untuk melaksanakan berbagai tugas dalam pekerjaan tertentu, serta kemampuan yang dimiliki individu terdiri dari kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Kemampuan intelektual yaitu kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas mental-berpikir, penalaran, dan memecahkan masalah. Kemampuan fisik yaitu kemampuan untuk melakukan tugas yang menuntut stamina, ketangkasan, kekuatan, dan karakteristik-karakteristik yang sama. Sikap menurut Robbins (2016:43) yaitu pernyataan-pernyataan evaluatif mengenai objek, orang, atau peristiwa. Sikap dalam suatu organisasi bersifat penting karena sikap secara umum berhubungan dengan perilaku, yakni sikap yang dimiliki seseorang menentukan apa yang akan dilakukan (Robbins, 2016:44).

Menurut (Judisuseno, 2008) dalam (Irwan, 2011), kompetensi yang digunakan perusahaan terdiri dari pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), dan perilaku (attitude). Pendapat tersebut sejalan dengan pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai standar yang ditetapkan.

2.1.4 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

Menurut Noerdiawan (2009:123) penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah, yang berarti informasi keuangan pemerintahan akan dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan juga terwujudnya transparansi serta akuntabilitas.

Laporan keuangan pokok pemerintah daerah menurut PP Nomor 71 tahun 2010 terdiri dari: (a) laporan realisasi anggaran (LRA); (b) neraca; (c) laporan arus kas (LAK) dan (d) catatan atas laporan keuangan (CaLK). Penyajian laporan kinerja dan laporan perubahan ekuitas diperkenankan untuk disajikan selain laporan keuangan pokok pemerintah daerah. Penjelasan PP Nomor 71 tahun 2010 memuat pernyataan standar akuntansi pemerintahan, yang selanjutnya disebut PSAP. PSAP terdiri dari 11 (sebelas) pernyataan standar yaitu:

1) PSAP Nomor 01 tentang penyajian laporan keuangan

Pernyataan standar ini memiliki tujuan untuk mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Untuk mencapai tujuan umum laporan keuangan standar ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dengan menerapkan basis akrual untuk pengakuan pendapatan dan beban, maupun pengakuan asset, kewajiban, dan ekuitas. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, diatur dalam standar akuntansi pemerintahan lainnya.

2) PSAP Nomor 02 tentang LRA

Tujuan standar LRA adalah menetapkan dasar-dasar penyajian LRA untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Pelaporan realisasi anggaran bertujuan untuk memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan

3) PSAP Nomor 03 tentang LAK

Tujuan pernyataan standar LAK adalah mengatur penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran selama satu periode akuntansi. Pelaporan arus kas memiliki tujuan untuk memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

4) PSAP Nomor 04 tentang CaLK

PSAP ini bertujuan untuk mengatur penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada CaLK. CaLK dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Laporan keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman di antara pembacanya, sehingga dalam laporan keuangan harus dibuat CaKL yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

5) PSAP Nomor 05 tentang akuntansi persediaan

Pernyataan standar ini untuk mengatur perlakuan akuntansi persediaan dan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas. Persediaan dalam hal pemerintah memproduksi sendiri meliputi barang yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian. Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi.

6) PSAP Nomor 06 tentang akuntansi investasi

Pernyataan standar ini bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk investasi dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan. Investasi pemerintah dibagi atas dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset nonlancar.

7) PSAP Nomor 07 tentang akuntansi aset tetap.

Tujuan pernyataan standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap. Permasalahan utama akuntansi untuk aset tetap adalah saat pengakuan aset, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat (*carrying value*) aset tetap. Pernyataan standar ini mensyaratkan bahwa aset tetap dapat diakui sebagai aset jika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan suatu aset dalam kerangka konseptual akuntansi pemerintahan.

8) PSAP Nomor 08 tentang akuntansi konstruksi dalam pengerjaan.

Tujuan pernyataan standar konstruksi dalam pengerjaan adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk konstruksi dalam pengerjaan dengan metode nilai historis. Permasalahan utama akuntansi untuk konstruksi dalam pengerjaan adalah jumlah biaya yang diakui sebagai aset yang harus dicatat sampai dengan konstruksi tersebut selesai dikerjakan. Pernyataan standar ini memberikan panduan untuk (a) identifikasi pekerjaan yang dapat diklasifikasikan sebagai konstruksi dalam pengerjaan; (b) penetapan besarnya biaya yang dikapitalisasi dan disajikan di neraca; (c) penetapan basis pengakuan dan pengungkapan biaya konstruksi.

9) PSAP Nomor 09 tentang akuntansi kewajiban.

Pernyataan standar tentang akuntansi kewajiban bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi kewajiban meliputi saat pengakuan, penentuan nilai tercatat, amortisasi, dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab

untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban dalam konteks pemerintahan antara lain muncul karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/relokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.

10) PSAP Nomor 10 tentang koreksi kesalahan.

Tujuan pernyataan standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, dan peristiwa luar biasa. Laporan keuangan untuk melaporkan pengaruh kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi dan peristiwa luar biasa suatu entitas harus disusun dan disajikan dengan menerapkan pernyataan standar ini.

11) PSAP Nomor 11 tentang laporan keuangan konsolidasi.

Pernyataan standar ini untuk mengatur penyusunan laporan keuangan konsolidasian pada unit-unit pemerintahan dalam rangka menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan dimaksud. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

12) PSAP Nomor 12 tentang laporan operasional

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Pengguna laporan membutuhkan Laporan Operasional dalam mengevaluasi pendapatan-LO dan beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintahan.

2.1.5 Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

2.1.5.1 Pengertian SPIP

Pengertian Sistem Pengendalian Intern menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008, Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pengertian dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 menyebutkan bahwa SPIP adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah.

2.1.5.2 Unsur-unsur sistem pengendalian intern pemerintah

Unsur-unsur SPIP menurut PP No 60 Tahun 2008, mengacu pada unsur SPI yang telah dipraktikkan pada lingkungan pemerintahan di berbagai negara, meliputi:

1) Lingkungan pengendalian

Lingkungan pengendalian berkaitan dengan orang, moralitas, integritas, kejujuran, dan kompetensi. Pimpinan instansi pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian intern dan manajemen yang sehat, melalui: a) penegakan integritas dan nilai etika; b) komitmen terhadap kompetensi; c) kepemimpinan yang kondusif;

d) pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan; e) pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat; f) penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia; g) perwujudan peran aparat pengawaasan intern pemerintah yang efektif; dan h) hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

2) Penilaian risiko

Pengendalian intern harus memberikan penilaian atau risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam. Penilaian risiko terdiri atas identifikasi risiko dan analisis risiko.

Penilaian risiko diawali dengan Pimpinan Instansi Pemerintah menetapkan maksud dan tujuan Instansi Pemerintah dengan spesifik, terukur, dapat dicapai, serta menetapkan pula tujuan pada tingkatan kegiatan. Selanjutnya Instansi Pemerintah mengidentifikasi secara efisien dan efektif risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut., baik yang bersumber dari dalam maupun luar instansi. Penilaian risiko terdiri atas:

1. Identifikasi Resiko. Mengidentifikasi secara efisien dan efektif risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi, baik yang bersumber dari dalam maupun luar instansi.
2. Analisis Resiko. Menentukan dampak dari resiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan instansi.

3) Kegiatan pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dapat membantu memastikan dilaksanakannya arahan pimpinan Instansi Pemerintah untuk mengurangi risiko yang telah diidentifikasi selama proses penilaian risiko.

Kegiatan pengendalian terdiri atas: (a) reviu atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan; (b) pembinaan sumber daya manusia; (c) pengendalian atas pengelolaan sistem informasi; (d) pengendalian fisik atas aset; (e) pemisahan fungsi; (f) pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian; (g) dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan

kejadian penting serta (h) pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya.

4) Informasi dan komunikasi

Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan instansi pemerintah dan pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan saran tertentu serta tepat waktu sehingga memungkinkan pimpinan instansi pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggungjawabnya. Komunikasi atas informasi harus diselenggarakan secara efektif. Penyelenggaraan komunikasi secara efektif, pimpinan instansi pemerintah harus : a) Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi ; dan b) mengelola, mengembangkan, dan memperbarui system informasi secara terus menerus.

5) Pemantauan

Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya dapat segera ditindaklanjuti. Pemantauan sistem pengendalian intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, tindak lanjut hasil rekomendasi audit dan reviu lainnya. Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervise, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas. Evaluasi terpisah diselenggarakan melalui penilaian sendiri, reviu, dan pengujian efektivitas Sistem Pengendalian Intern yang dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah dengan menggunakan daftar uji pengendalian intern.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini lebih mengacu pada penelitian Sudiarianti (2015) dengan judul pengaruh kompetensi sumber daya manusia pada penerapan system pengendalian intern pemerintah dan standar akuntansi pemerintah serta implikasinya pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kompetensi SDM berpengaruh terhadap penerapan SPIP dan SAP yang berarti semakin tinggi kompetensi SDM yang dimiliki maka penerapan SPIP, SAP dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan cenderung semakin baik. Penerapan SPIP dan SAP berpengaruh terhadap kualitas

LKPD, semakin tinggi penerapan SPIP dan SAP yang dilaksanakan, maka kualitas LKPD semakin baik. Kompetensi SDM berpengaruh pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah melalui penerapan SPIP dan SAP. Semakin tinggi kompetensi yang dimiliki Sumber Daya Manusia melalui peningkatan penerapan SPIP dan SAP, akan berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, namun pengaruh kompetensi SDM terhadap kualitas LKPD memiliki pengaruh yang tidak langsung.

Adapun ringkasan dari penelitian terdahulu tersebut dan ada beberapa penelitian yang dijadikan acuan pada penelitian ini, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Tahun	Variabel	Hasil Penelitian
1	Adhi dan Suhardjo (2013)	penerapan SAP, kualitas aparatur pemerintah, kualitas laporan keuangan	Penerapan SAP dan kualitas aparatur pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Tetapi tidak ada hubungan moderasi antara penerapan SAP dan kualitas aparatur pemerintah daerah dalam pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan.
2	Fikri, dkk (2015)	Penerapan SAP, kompetensi aparatur, peran audit internal, SPI, kualitas laporan keuangan.	Penerapan SAP, kompetensi aparatur, peran audit internal, SPI tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

3	Ihsanti (2014)	kompetensi SDM dan penerapan system akuntansi keuangan daerah , kualitas laporan keuangan daerah.	Kompetensi SDM berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah,penerapan system akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
4	Nurillah (2014)	kompetensi SDM,penerapan SAKD,pemanfaatan TI dan SPI kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.	Kompetensi SDM,penerapan SAKD,pemanfaatan TI dan system pengendalian intern pemerintah (SPIP) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
5	Sudiarianti (2015)	Kompetensi SDM,penerapan SPIP dan SAP,kualitas LKPD	Kompetensi SDM berpengaruh positif pada penerapan SPIP,SAP, dan kualitas LKPD.Penerapan SPIP dan SAP berpengaruh pada kualitas LKPD. Kompetensi SDM berpengaruh pada kualitas LKPD melalui penerapan SPIP dan SAP.
6	Susilawati dan Riana (2014)	SAP,SPI,dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	SAP dan SPI berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, serta SAP dan SPI mempunyai pengaruh yang signifikan

			terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
7	Syarifuddin (2014)	Kompetensi SDM, peran audit intern, SPIP, kualitas LKPD	Kompetensi SDM dan peran audit intern tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas LKPD, namun kompetensi SDM dan peran audit intern berpengaruh signifikan terhadap SPIP dan SPIP berpengaruh terhadap kualitas LKPD.

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu konsep untuk menjelaskan, mengungkapkan, dan menunjukkan keterkaitan antar variabel yang akan diteliti, yaitu pengaruh kompetensi SDM terhadap kualitas LKPD dengan penerapan SPIP dan SAP sebagai variabel pemediasi/intervening.

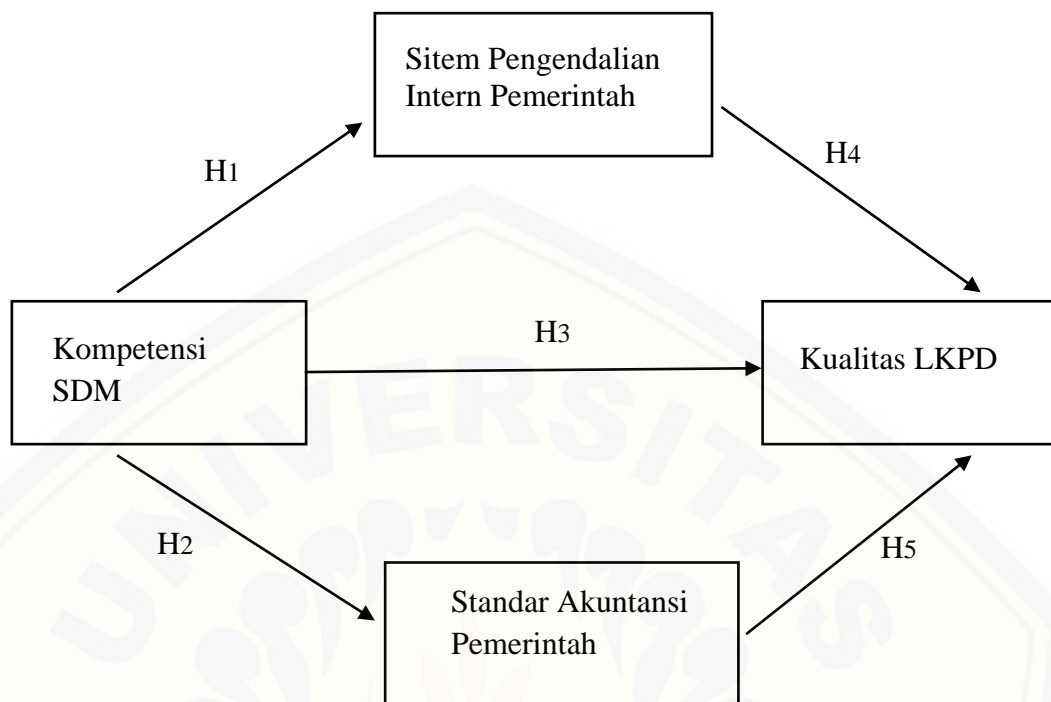
Kualitas laporan keuangan merupakan persyaratan normatif yang harus dipenuhi dalam penyusunan laporan keuangan agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan tersebut. Maka dari itu, LKPD yang dihasilkan harus berkualitas dikarenakan Laporan keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah selama satu periode pelaporan. Untuk mewujudkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas diperlukan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang baik. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah. Tanpa sistem pengendalian intern yang baik, maka kualitas laporan

keuangan tidak akan tercapai.

Dalam menciptakan kualitas laporan keuangan yang baik juga diperlukan adanya pedoman dalam proses penyusunan laporan keuangan. Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan pedoman bagi pemerintah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan sebagaimana yang telah ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, yang mana dalam penyusunan dan penyajiannya sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang telah ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Dengan demikian Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Faktor lain yang juga berpengaruh terhadap dihasilkannya laporan keuangan yang berkualitas adalah kompetensi sumber daya manusia. Kompetensi SDM yang dimaksud disini mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan standar yang ditetapkan yang dimiliki oleh SDM. Karena yang menjalankan SPIP serta SAP yaitu sumber daya manusia, maka kompetensi SDM sangatlah penting. Seberapa baik suatu standard dan system yang dibuat, jika yang menjalankannya tidak memiliki kompetensi yang memadai maka hasilnya tidak akan sesuai dengan yang seharusnya.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat digambarkan kerangka konseptual penelitian sebagai berikut.



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh kompetensi SDM terhadap penerapan SPIP

Kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan kerja sumber daya manusia yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai standar yang ditetapkan. Sumber daya manusia merupakan suatu pilar penyangga utama sekaligus sebagai roda penggerak organisasi dalam hal mewujudkan visi dan misi serta tujuan organisasi. Oleh karena itu, sumber daya manusia merupakan suatu elemen yang sangat penting, maka harus dipastikan bahwa dalam pengelolaan sumber daya manusia dilakukan dengan sebaik mungkin sehingga dapat memberikan kontribusi secara optimal, dan apa yang menjadi tujuan organisasi dapat tercapai secara optimal.

Kompetensi SDM yang semakin tinggi dimana yang dimaksud yaitu SDM dengan kemampuannya, keterampilannya dan sikapnya akan meningkatkan efektifitas penerapan SPIP (Setiawati dan Sari, 2014). Apabila SDM yang dimiliki

berkompeten maka dapat menjamin kepatuhan terhadap hukum dan perundangan, menjamin keandalan laporan keuangan dan data keuangan, memfasilitasi efisiensi dan efektivitas operasi pemerintah, sehingga dapat mencapai tujuan organisasi dan dengan pengendalian intern dapat memenuhi keakuratan data informasi dalam penyusunan LKPD.

Pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP dalam lingkungan kerjanya melalui; a) penegakan integritas dan nilai etika; b) komitmen terhadap kompetensi; c) kepemimpinan yang kondusif; d) pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan; e) pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat; f) penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia; g) perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan h) hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait (Irwan, 2011).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sudiarianti (2015) menyimpulkan bahwa kompetensi SDM berpengaruh positif pada penerapan SPIP yang artinya untuk dapat meningkatkan penerapan SPIP dibutuhkan kompetensi SDM yang baik. Syarifuddin (2014) memberikan temuan bahwa kompetensi SDM berpengaruh positif yang signifikan terhadap efektifitas penerapan SPIP, yang artinya semakin tinggi variasi kompetensi SDM maka pengendalian internal pemerintah akan semakin efektif. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Irwan (2011) di Sumatera Barat yang menyatakan bahwa kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Berdasarkan uraian tersebut, maka hubungan antara kompetensi sumber daya manusia dengan penerapan SPIP dapat dihipotesiskan sebagai berikut.

H1: Kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap penerapan SPIP

2.4.2 Pengaruh kompetensi SDM terhadap penerapan SAP

Kompetensi adalah pengetahuan dan kemampuan yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu tugas atau pekerjaan. Dalam Marwansyah (2016:35) juga diungkapkan bahwa kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, karakteristik kepribadian, dan sikap yang memungkinkan karyawan untuk menjalankan tugas-tugas dan peran-peran dalam pekerjaannya. Kompetensi SDM menjadi hal utama yang harus diperhatikan dalam suatu organisasi. Mengingat tercapainya suatu organisasi bergantung kepada siapa yang menjalankan organisasi tersebut, maka dalam pemerintahan sangat penting memiliki SDM yang berkompeten. Pada sektor publik/pemerintahan dituntut untuk membuat laporan pertanggungjawabannya berupa LKPD setiap satu periode sebagai bentuk pertanggungjawaban atas anggaran yang digunakannya serta kinerjanya. Dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah diharuskan mengacu kepada prinsip-prinsip akuntansi yaitu SAP. Untuk dapat menerapkan SAP dengan baik, diperlukan kompetensi SDM. Dengan kompetensi yang tinggi dapat meminimalisir tingkat kegagalan SDM dalam melaksanakan tugas yang telah diberikan. Sehingga apabila SDM yang menerapkan SAP memiliki kompetensi yang tinggi kemungkinan terjadi salah saji yang material dalam laporan keuangan dapat diminimalisir.

Kompetensi SDM yang memadai baik itu dari segi kualitas dan kuantitas akan membantu dalam memahami Standar Akuntansi Pemerintah. Penerapan SAP akan menjamin laporan keuangan disusun sesuai dengan standar yang berlaku (Suhardjo, 2013). Oleh karena itu, sumber daya manusia yang berkompeten tersebut mampu memahami isi dari SAP dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia yang dimiliki pemerintah dalam memahami dan menerapkan SAP akan berdampak pada ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah.

Penelitian yang dilakukan oleh Sudiarianti (2015) menunjukkan hasil bahwa kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap penerapan SAP. Berdasarkan uraian tersebut, maka hubungan antara kompetensi sumber daya manusia dengan

penerapan SAP dapat dihipotesiskan sebagai berikut.

H2: Kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap penerapan SAP.

2.4.3 Pengaruh kompetensi SDM terhadap kualitas LKPD

Laporan keuangan pada dasarnya bentuk pertanggungjawaban dari pihak pemerintah. Dengan dilakukannya pelaporan keuangan dapat memenuhi kewajiban pemerintah dalam hal akuntabel dan transparansi. Selain itu, pelaporan keuangan juga dapat memenuhi perolehan informasi mengenai daerahnya bagi masyarakat. Maka dari itu, kualitas LKPD sangatlah penting. Untuk dapat menyusun LKPD berkualitas dibutuhkan SDM yang berkompentensi. Seseorang yang memiliki kompetensi akan bekerja dengan pengetahuan dan keterampilannya serta dengan pengalamannya sehingga meminimalisir tingkat kesalahan dalam melakukan penyusunan laporan keuangan.

Kompetensi Sumber Daya Manusia memiliki pengaruh yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah dalam suatu organisasi, karena dengan sumber daya manusia yang baik dan berkompoten, maka dapat menentukan kemajuan atau berkembangnya suatu organisasi. Kompetensi sumber daya manusia yang baik dapat dilihat dari latar belakang pendidikan yang menjadi dasar pengetahuan dan kemampuan serta skill yang dibutuhkan dalam memberikan inovasi pada masing-masing daerah. Kompetensi sumber daya juga untuk dapat menghindari penyelewengan seperti tindak korupsi, manipulasi atau *creative accounting* (Widyaningrum, 2009).

Perubahan yang seharusnya dilakukan sebagai perbaikan dalam sistem pemerintahan terutama terkait dengan sumber daya manusia. Dimana sumber daya manusia yang dimiliki harus berkompoten dalam bidangnya. Apabila sumber daya manusia yang menjalankan sistem akuntansi memiliki kompetensi yang memadai, maka informasi akuntansi yang disajikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah akan menjadi berkualitas. Dengan dihasilkan laporan keuangan yang berkualitas maka tata kelola pemerintah menjadi baik (*good governance*).

Penelitian yang dilakukan oleh Sudiaranti (2015) memberikan temuan bahwa kompetensi SDM berpengaruh positif pada kualitas LKPD, yang artinya

untuk dapat meningkatkan kualitas LKPD dibutuhkan kompetensi SDM yang baik. Penelitian yang dilakukan Ihsanti (2014) , Andini dan Yusrawati (2015) , Wati dkk (2014) , Adhi dan Suhardjo (2013) menyimpulkan bahwa kompetensi SDM berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka hubungan antara kompetensi SDM dengan kualitas LKPD dihipotesiskan sebagai berikut.

H₃: Penerapan kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD

2.4.4 Pengaruh penerapan SPIP terhadap kualitas LKPD

Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006 menyebutkan SPIP adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah. Pengendalian intern dalam laporan keuangan pemerintah daerah menjadi suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan, sehingga dapat mencapai efisiensi, efektifitas, dan mencegah terjadinya kerugian keuangan negara demi kepentingan masyarakat dan daerah (Mirnayanti, 2013)

Menurut (mahmudi,2007:27) dalam (Komarudin,2014) menyatakan, untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan proses dan tahap-tahap yang harus dilalui yang diatur dalam system akuntan pengendalian daerah. Sistem akuntansi di dalamnya mengatur tentang system pengendalian intern (SPI), kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh bagus tidaknya sistem pengendalian intern yang dimiliki pemerintah daerah.

Menurut Tantriani Sukmaningrum (2011:38) dalam (Susilawati,2014) pengaruh antara Sistem Pengendalian Intern dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yaitu : "Sistem pengendalian intern meliputi berbagai alat manajemen yang bertujuan mencapai berbagai tujuan yang luas. Tujuan tersebut yaitu menjamin kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, menjamin keandalan laporan keuangan dan data keuangan, memfasilitasi efisiensi dan efektivitas operasi-operasi pemerintah. Dengan demikian, pengendalian intern merupakan

pondasi *good governance* dan garis pertama dalam melawan ketidakabsahan data dan informasi dalam penyusunan LKPD.” Pengendalian intern ditujukan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa LKPD harus disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi di Indonesia, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku dan peningkatan kegiatan operasi secara efektif dan efisien (Sari, 2012).

Penelitian yang dilakukan Sudiarianti (2015) menyimpulkan bahwa penerapan SPIP berpengaruh positif pada kualitas LKPD, yang berarti penerapan SPIP yang baik akan cenderung menghasilkan LKPD yang baik. Penelitian Susilawati (2014) juga memberikan temuan bahwa system pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka hubungan antara SPIP dengan kualitas LKPD dihipotesiskan sebagai berikut.

H4: Penerapan SPIP berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD.

2.4.5 Pengaruh penerapan SAP terhadap kualitas LKPD

Standar akuntansi pemerintah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan diterapkan di lingkup pemerintahan, baik di pemerintah pusat dan departemen- departemennya maupun di pemerintah daerah dan dinas-dinasnya. Standar akuntansi pemerintah menjadi salah satu kriteria audit bagi auditor sebagai dasar penilaian apakah laporan keuangan sudah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi. Laporan keuangan merupakan laporan terstruktur yang menyajikan mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan (PP 71, 2010)

Penerapan SAP menjamin bahwa laporan keuangan yang disusun telah sesuai dengan standar yang berlaku. Standar Akuntansi Pemerintah merupakan persyaratan yang memiliki kekuatan hukum, serta SAP menjamin laporan keuangan yang disusun memenuhi kriteria informasi keuangan yang berguna bagi penggunaannya. Menurut Noerdiawan (2009:123), penerapan SAP akan berdampak

pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah. Maka, laporan keuangan yang disajikan harus sesuai dengan SAP (PP Nomor 8 Tahun 2006).

Penelitian yang dilakukan oleh Sudiarianti (2015) mengungkapkan bahwa penerapan SAP berpengaruh positif pada kualitas LKPD. Penelitian adhi dan suhardjo (2013), Susilawati dan Riana (2014), Rahayu, dkk (2014), menyimpulkan bahwa penerapan SAP berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan. Semakin diterapkannya SAP, maka laporan keuangan yang dihasilkan akan semakin berkualitas. Berdasarkan uraian tersebut, maka hubungan antara SAP dengan kualitas LKPD dihipotesiskan sebagai berikut.

H₅: Penerapan SAP berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD.

2.4.6 Pengaruh kompetensi SDM terhadap kualitas LKPD melalui penerapan SPIP

Sesuai pasal 58 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, bahwa Presiden menyelenggarakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dalam rangka pengelolaan keuangan negara. Pengendalian intern yang efektif akan dapat meminimalisir risiko kesalahan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Dengan demikian adanya penerapan SPIP sangat membantu manajemen pemerintahan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, khususnya dalam rangka meningkatkan keandalan laporan keuangan.

Sistem pengendalian intern yang baik tentunya tidak akan berguna jika tidak didukung dengan sumber daya manusia yang kompeten (Fikri dkk 2015). Irwan (2011) menyatakan bahwa SPIP yang dijalankan oleh SDM yang memiliki kompetensi mampu memberikan keyakinan yang memadai bahwa SPIP dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga kualitas laporan keuangan memenuhi empat karakteristik yang dipersyaratkan yaitu relevan, andal, dapat diperbandingkan dan dapat dipahami. Kompetensi SDM dengan adanya penerapan SPIP dapat semakin meningkatkan kualitas LKPD. Hal ini dapat dijelaskan karena dengan kompetensi SDM dalam penerapan SPIP, maka kesalahan dalam hal pencatatan atau penilaian aset dapat terdeteksi sejak awal

periode akuntansi sehingga dapat meminimalisir kekeliruan pencatatan, penyimpangan maupun factor ketidakpatuhan terhadap peraturan. Sehingga laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan akan berkualitas.

Penelitian yang dilakukan Sudiarianti (2015) di Pemkab Tabanan, memberi temuan bahwa terdapat pengaruh positif terhadap kompetensi SDM pada kualitas LKPD melalui penerapan SPIP, yang artinya semakin tinggi kompetensi SDM melalui peningkatan penerapan SPIP maka berdampak pada meningkatnya kualitas LKPD. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Syarifuddin (2014) dengan temuan bahwa SPIP sebagai variabel mediasi berpengaruh signifikan dalam memediasi kompetensi SDM terhadap kualitas LKPD. Berdasarkan uraian tersebut, maka hubungan antara kompetensi SDM pada kualitas LKPD melalui penerapan SPIP dihipotesiskan sebagai berikut.

H₆: Kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD melalui penerapan SPIP.

2.4.7 Pengaruh kompetensi SDM terhadap kualitas LKPD melalui penerapan SAP

Standar Akuntansi Pemerintah merupakan prinsip akuntansi yang harus diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah maupun pusat. Penerapan yang sesuai dengan SAP merupakan penentu atas kualitas laporan keuangan yang dihasilkan (Susilawati dan Riana, 2014). Standar Akuntansi pemerintahan akan berjalan secara terstruktur dan sesuai dengan pedoman yang berlaku sehingga mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan akurat terutama keberadaanya sangat penting dan dibutuhkan untuk pertanggungjawaban (Rahayu, 2014).

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah yang baik membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, dikarenakan didalam penyusunan laporan keuangan perlu keahlian yang berkaitan dengan pengakuan pendapatan, pengakuan belanja, prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasi, investasi, pengakuan dan penghapusan aset berwujud dan tidak berwujud, kontrak konstruksi, kebijakan kapitalisasi pengeluaran, kemitraan dengan pihak ketiga, biaya penelitian dan

pengembangan, perhitungan persediaan, serta perhitungan dana cadangan (Irwan, 2011). Kompetensi dan keahlian yang dimiliki sumber daya manusia dapat meminimalisir kesalahan yang material dalam penyajian laporan keuangan, dan dapat teruji kebenarannya, sehingga informasi yang tersaji didalamnya dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus disusun oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam bidang akuntansi sehingga mampu menafsirkan/memahami SAP. Keterbatasan kompetensi yang dimiliki SDM dalam memahami mekanisme penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan SAP, akan menjadi kendala dalam mewujudkan LKPD yang berkualitas. Dengan kata lain, kualitas laporan keuangan pemerintah sangat dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku (Komaruddin, 2014).

Penelitian yang dilakukan Sudiarinti (2015) di Pemkab Tabanan, memberi temuan bahwa kompetensi SDM berpengaruh positif pada kualitas LKPD dengan penerapan SAP sebagai pemediasi. Berdasarkan uraian tersebut, maka hubungan antara kompetensi SDM pada kualitas LKPD melalui penerapan SPIP dihipotesiskan sebagai berikut.

H₇: Kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD melalui penerapan SAP.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini akan mengukur dan menganalisis pengaruh kompetensi SDM, penerapan SPIP, dan SAP terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung. Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif untuk mendeskripsikan variable-variabel penelitian dan penelitian kausal untuk mencari pengaruh antar variabel penelitian. Penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap fenomena atau populasi tertentu yang diperoleh peneliti dari subyek berupa: individu, organisasional, industry atau perspektif orang lain (Indriantoro dan Bambang, 2014:88).

Desain penelitian ini dengan survei. Data penelitian yang dibutuhkan adalah data primer. Teknik pengumpulan data primer berupa penyebaran kuesioner. Data yang ada akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan program SPSS (*Statistical Package For Social Science*) version 23. Hasil analisis tersebut kemudian diinterpretasikan dan dibahas sehingga pada akhirnya hasil penelitian dapat disimpulkan dan diberikan saran terhadap permasalahan tersebut.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo. Pemilihan lokasi penelitian ini dengan alasan opini BPK-RI terhadap LKPD TA 2015 Pemkab Situbondo mengalami penurunan dari opini WTP-DPP menjadi WDP. Opini WDP ini bukan merupakan suatu hasil yang maksimal, tetapi mengindikasikan masih banyak kelemahan dalam pencatatan dan pelaporan keuangan daerah yang perlu diperbaiki (Indriasih, 2014).

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data Primer ialah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini harus dicari melalui

narasumber atau dalam istilahnya teknisnya responden, yaitu orang yang dijadikan sebagai objek penelitian atau orang yang dijadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data. Untuk mengumpulkan data primer, diperlukan metode yang disebut survei. Metode pengumpulan data primer dilakukan melalui penyebaran kuesioner secara langsung kepada responden.

3.4 Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi ialah seluruh objek yang akan diteliti dalam sebuah penelitian. Menurut Sugiyono (2014:115) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari :obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh entitas akuntansi/penatausahaan keuangan pada 49 SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono,2014:116). Metode pengambilan sample dalam penelitian ini adalah dengan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel dengan menggunakan pertimbangan/kriteria tertentu. Subyek penelitian yang dijadikan sampel adalah PPK-SKPD di lingkungan Pemkab Situbondo dengan kriteria yaitu masa jabatan PPK-SKPD minimal 1 (satu) tahun dalam periode penyusunan laporan keuangan. Usia jabatan minimal 1 tahun diasumsikan bahwa PPK-SKPD telah memiliki pemahaman dan pengetahuan yang memadai mengenai penatausahaan keuangan terutama dalam hal penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan kriteria tersebut, maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 43 (empat puluh tiga) responden.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini berupa angket/kuesioner pengembangan dari kuesioner penelitian Sudiarianti (2015). Angket/kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada orang lain yang dijadikan responden untuk dijawabnya. Kuesioner pada penelitian ini digunakan

untuk memperoleh data mengenai kualitas LKPD Kabupaten Situbondo, kompetensi SDM, penerapan SPIP, serta SAP.

3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.6.1 Variabel penelitian

Menurut Sugiyono(2014:59) Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Variabel independen (bebas) adalah variable yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variable dependen (Sugiyono,2014:59). Variabel independen dalam penelitian ini adalah kompetensi SDM (X_1).
- 2) Variabel dependen (terikat) adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono,2014:59). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y)
- 3) Variabel intervening (pemediasi) adalah variable yang mempengaruhi hubungan antara variable independen menjadi hubungan yang tidak langsung dan dapat diamati dan diukur (Sugiyono,2014:59). Variabel intervening dalam penelitian ini adalah penerapan SPIP (Z_1) dan penerapan SAP (Z_2).

3.6.2 Definisi Operasional variable

Kerlinger (1973) dalam Sugiyono (2014:58) menyatakan bahwa variable sebagai suatu sifat yang dapat diambil dari suatu nilai yang berbeda. Variabel merupakan konstruk atau sifat yang akan dipelajari. Untuk mengukur variable yang akan diteliti melalui tanggapan dari responden digunakan Skala Likert, dalam penelitian ini masing-masing jawaban atas pertanyaan dalam kuesioner diberi skor sebagai berikut:

1. Skor 5 untuk kategori sangat setuju (SS)
2. Skor 4 untuk kategori setuju (S)
3. Skor 3 untuk kategori netral (N)
4. Skor 2 untuk kategori tidak setuju (TS)
5. Skor 1 untuk kategori sangat tidak setuju (STS)

Masing-masing definisi operasional variable akan dijelaskan sebagai berikut:

1) Kualitas LKPD (Y)

Kualitas LKPD yang dimaksud dalam penelitian ini adalah berdasarkan karakteristik kualitatif laporan keuangan yang terdapat dalam PP Nomor 71 tahun 2010. Instrumen tersebut berisi 16 butir pertanyaan yang mengukur kualitas LKPD dengan menggunakan empat indikator yang dimodifikasi dari kuesioner Sudiarianti (2015), yaitu 1) Relevan, dengan karakteristik memiliki manfaat umpan balik, memiliki manfaat prediktif, tepat waktu dan lengkap; 2) Andal, dengan karakteristik penyajian jujur, dapat diverifikasi (*variability*) serta netralitas; 3) Dapat dibandingkan; 4) Dapat dipahami. Untuk pengukuran variabelnya peneliti menggunakan skala likert 5 poin. Skor terendah (poin 1) yang artinya responden sangat tidak setuju sedangkan skor tertinggi (poin 5) yang artinya responden sangat setuju dengan pernyataan yang ditulis penulis.

2) Kompetensi SDM (X_1)

Kompetensi SDM yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemampuan yang dimiliki PPK-SKPD di lingkungan Pemkab Situbondo dalam melaksanakan tugas yang ditanggungnya berdasarkan jabatan yang diterimanya. Instrumen tersebut berisi 19 butir pertanyaan mengenai kompetensi SDM dengan menggunakan tiga indikator yang dimodifikasi dari kuesioner Sudiarianti (2015), yaitu : 1) pengetahuan yang dimiliki oleh seorang PPK-SKPD dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan bidangnya; 2) Keterampilan, kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap PPK-SKPD; 3)

Perilaku, pola tingkahlaku PPK-SKPD dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Untuk pengukuran variabelnya peneliti menggunakan skala likert 5 poin. Skor terendah (poin 1) yang artinya responden sangat tidak setuju sedangkan skor tertinggi (poin 5) yang artinya responden sangat setuju dengan pernyataan yang ditulis penulis.

3) Penerapan SPIP (X_2)

Penerapan SPIP yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah. Instrumen tersebut berisi 22 butir pertanyaan mengenai penerapan SPIP dengan menggunakan lima indikator yang dimodifikasi dari kuesioner Sudiarianti (2015), yaitu : 1) Lingkungan pengendalian; 2) Penilaian risiko; 3) Kegiatan pengendalian; 4) Informasi dan komunikasi; 5) Pemantauan. Untuk pengukuran variabelnya peneliti menggunakan skala likert 5 poin. Skor terendah (poin 1) yang artinya responden sangat tidak setuju sedangkan skor tertinggi (poin 5) yang artinya responden sangat setuju dengan pernyataan yang ditulis penulis.

4) Penerapan SAP (X_3)

Penerapan SAP yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penerapan SAP oleh PPK-SKPD didalam menyusun laporan keuangan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang SAP yang terdiri atas 12 (Dua belas) pernyataan standar. Untuk PSAP No.3 tentang Laporan Arus Kas serta PSAP No.11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasi tidak dijadikan sebagai instrument penelitian. Sehingga hanya menggunakan 10 (sepuluh) pernyataan standar, yaitu :

1. PSAP No.01 tentang Penyajian Laporan Keuangan;
2. PSAP No.02 tentang LRA;
3. PSAP No.03 tentang CaLK;
4. PASP No.05 tentang akuntansi persediaan;
5. PSAP No.06 tentang akuntansi investasi;
6. PSAP No.07 tentang akuntansi aset tetap;
7. PSAP No.08 tentang akuntansi konstruksi dalam pengerjaan;
8. PSAP No.09 tentang akuntansi kewajiban;
9. PSAP No.10 tentang koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi dan peristiwa luar biasa;
10. PSAP No.12 tentang Laporan Operasional

Instrumen tersebut berisi 26 butir pertanyaan mengenai penerapan SAP, dengan menggunakan 11 indikator (tertuang dalam pernyataan standar) yang dimodifikasi dari kuesioner Sudiarianti (2015). Skor terendah (poin 1) yang artinya responden sangat tidak setuju sedangkan skor tertinggi (poin 5) yang artinya responden sangat setuju dengan pernyataan yang ditulis penulis.

3.7 Analisis Data

Menurut Sugiyono(2014:206) pada penelitian kuantitatif,kegiatan analisis data meliputi mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden,mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden,menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Dalam penelitian ini,analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif,uji kualitas data,uji asumsi klasik dan uji hipotesis.

3.7.1 Statistik Deskriptif

Statistic deskriptif adalah statistic yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono 2014:206). Statistik deskriptif umumnya digunakan oleh peneliti untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variable penelitian yang utama dan data demografi responden (jika ada). Ukuran yang digunakan dalam deskripsi antara lain berupa: frekuensi, tendensi sentral (rata-rata, median, modus), disperse (deviasi standard dan varian) dan koefisien antar variable penelitian. Sedangkan menurut Ghazali (2016:19), statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata, standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi).

Dalam penelitian ini, data dianalisis dengan menggunakan alat statistic deskriptif untuk memberikan suatu gambaran mengenai identitas dari responden, seperti : jenis kelamin, jabatan, strata pendidikan, dan deskripsi mengenai variable-variabel penelitian.

3.7.2 Uji Kualitas Data

Uji kualitas data digunakan dalam penelitian yang mengukur variable dengan menggunakan instrument kuesioner. Pengujian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui valid dan reliable suatu instrumen. Penelitian akan menghasilkan suatu kesimpulan yang bias apabila data yang digunakan kurang valid dan kurang reliable. Terdapat dua konsep dalam mengukur kualitas data, yaitu: validitas dan reliabilitas. Berikut penjelasan mengenai masing-masing dari dua konsep uji kualitas data tersebut.

1. Uji Validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan dari suatu instrument (Indriantoro dan Supomo, 2014:181). Uji validitas digunakan untuk mengukur valid/sah atau tidaknya suatu kuesioner (Ghozali, 2016:52). Kevalidan suatu kuesioner diukur berdasarkan pertanyaan pada kuesioner mampu

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas akan dihitung menggunakan bantuan SPSS (*Statistical Package For Social Sciences*) version 23.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah mengetahui konsistensi atau keteraturan hasil pengukuran suatu instrument apabila instrument tersebut digunakan lagi sebagai alat ukur suatu objek atau responden (Supriyadi,2014:29). Ghozali(2016:47) berpendapat bahwa sebenarnya reliabilitas adalah alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indicator dari variable atau konstruk. Suatu kuisisioner dikatakan reliabel atau handal apabila jawaban pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.Pada penelitian ini, uji reabilitas dapat dilakukan dengan menghitung conbach alpha dari masing-masing item dengan bantuan computer SPSS (*Statistical Package For Social Sciences*) version 23.

3.7.3 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji kenormalan residual atau data yang akan diolah. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2016:154). Terdapat dua cara yang dapat digunakan untuk menguji apakah nilai residual terdistribusi normal,yakni dengan analisis grafik dan uji statistic. Dalam penelitian ini menggunakan metode uji statistic *kolmogrov-smirnov* dengan menetapkan derajat keyakinan (α) sebesar 5%. Uji ini dilakukan pada setiap variabel dengan ketentuan bahwa jika secara individual masing-masing variabel memenuhi asumsi normalitas,maka secara simultan variabel-variabel tersebut juga bisa dinyatakan memenuhi asumsi normalitas (Prayitno, 2010:71). Pengujian normalitas dengan melihat nilai *Asymp. Sig. (2 tailed)*,apabila menggunakan ukuran ini maka harus dibandingkan dengan tingkat alpha (α) (Sudarmanto,2010:130). Kriteria yang digunakan yaitu jika nilai *Asymp. Sig. (2 tailed)* > dari tingkat alpha yang ditetapkan maka data tersebut berdistribusi normal, tetapi jika *Asymp. Sig. (2 tailed)* < dari

tingkat alpha yang ditetapkan maka data tersebut tidak berdistribusi normal (Sudarmanto,2010:130).

1. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antarvariabel bebas (Ghozali,2016:103). Cara untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas adalah dengan :

1. Melihat nilai R yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi,tetapi tingkat signifikan yang sangat kecil dari regresi tersebut dan cenderung banyak yang tidak signifikan.
2. Menganalisis nilai korelasi antara variable independen.Jika antar variable independen ada korelasi yang cukup tinggi (diatas 0,8),maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolinearitas .
3. Multikolinearitas dapat juga dilihat dari :
 - a. Nilai tolerance dan lawannya;
 - b. Variance Inflation Factor (VIF).

Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variable independen manakah yang dijelaskan oleh variable independen lainnya.

2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah keadaan dimana terjadi ketidaksamaan varian dari residual untuk pengamatan pada model regresi. Model regresi yang baik ialah tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Cara mendeteksi salah satunya dengan melihat grafik scatter plot antara lain prediksi variable terikat dengan residualnya. Jika ada pola tertentu, titik-titik yang membentuk suatu pola (bergelombang, melebar, dan menyempit) maka terjadi heteroskedastisitas.Jika tidak ada pola yang jelas,serta titik-titik menyebar dari atas ke bawah angka nol pada sumbu Y,maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.7.4 Uji Hipotesis

1. Uji- F

Uji F merupakan uji kelayakan model yang harus dilakukan dalam analisis regresi linier. Uji F dapat digunakan untuk melihat model regresi yang digunakan signifikan atau belum dengan ketentuan bahwa $p \text{ value} < (\alpha) = 0,05$ dan $F \text{ hitung} > F \text{ tabel}$ berarti model tersebut signifikan dan bisa digunakan untuk menguji hipotesis, dengan tingkat kepercayaan 95% (Ghozali, 2013:84).

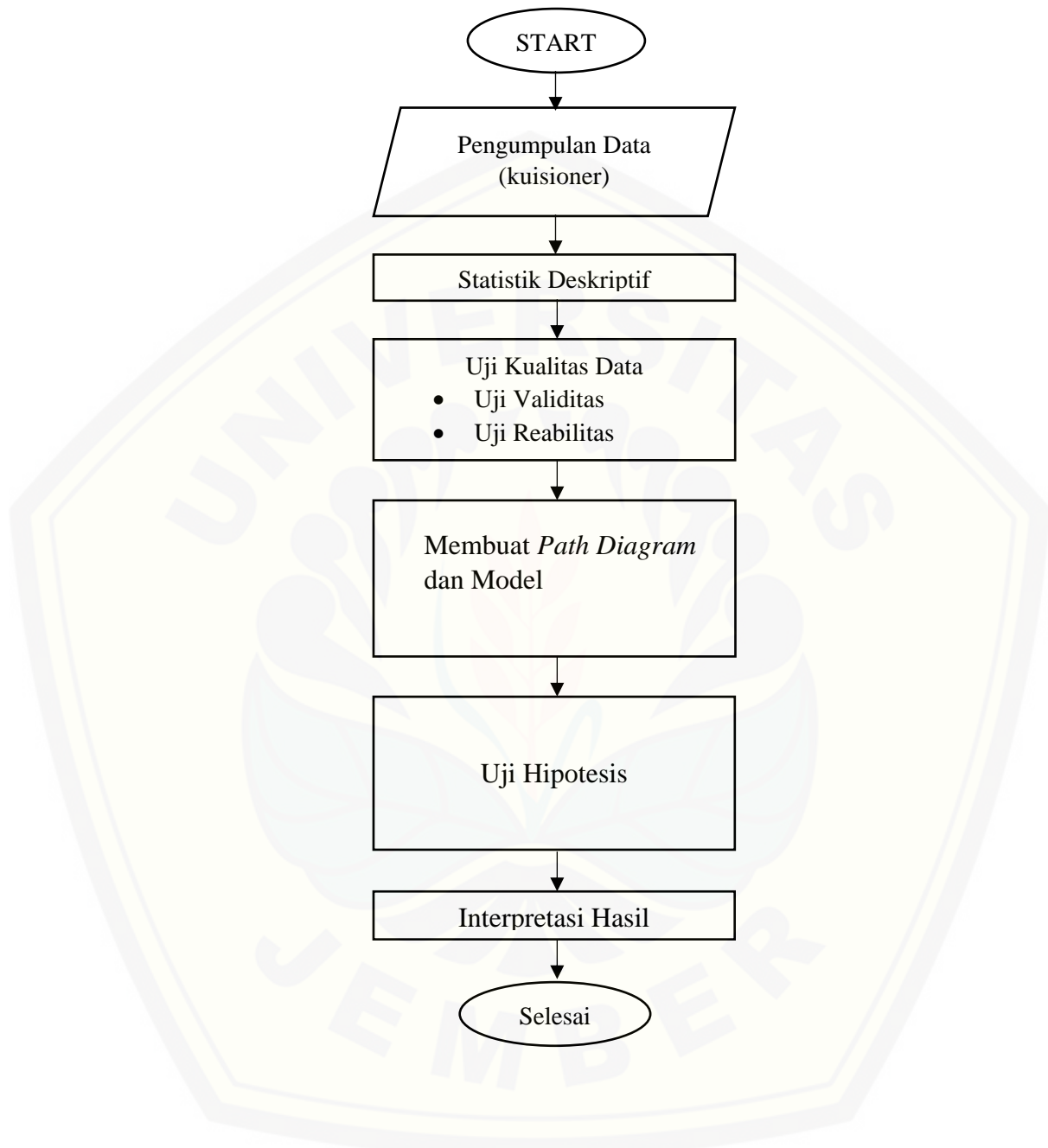
2. Uji- t

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2011:98). Uji t dapat dilakukan dengan membandingkan signifikansi t_{hitung} dengan ketentuan : jika $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$ pada $\alpha 0,05$, maka H_0 ditolak dan jika $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ pada $\alpha 0,05$, maka H_a diterima (Ghozali, 2013:84).

3. Analisis Jalur (Part Analysis)

Intervening atau mediasi merupakan variable penyela/antara yang berfungsi memediasi hubungan antara variabel independen dan dependen. Untuk menguji pengaruh variable intervening digunakan metode jalur. Analisis jalur (Path Analysis) merupakan perluasan dari analisis regresi linier berganda, atau analisis jalur adalah penggunaan analisis regresi untuk menaksir hubungan kausalitas antar variabel (*model casual*) yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan teori (Ghozali, 2016:233). *Path Analysis* (Analisis Jalur) digunakan sebuah metode yang digunakan dalam penelitian kuantitatif dimana metode ini berfungsi untuk mengetahui besar kecilnya masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis jalur itu sendiri tidak dapat menentukan hubungan sebab akibat dan juga tidak dapat digunakan sebagai substitusi bagi peneliti untuk melihat hubungan kausalitas antar variabel (Ghozali, 2016:233). Yang dilakukan oleh analisis jalur adalah menentukan pola hubungan antara tiga atau lebih variabel dan tidak dapat digunakan untuk mengkonfirmasi atau menolak hipotesis kausalitas imajiner (Ghozali, 2016:233). Analisis jalur dapat mempelajari hubungan yang terjadi disebabkan oleh pengaruh langsung dan tidak langsung.

3.8 Kerangka Pemecahan Masalah



Gambar 3.1

Kerangka Pemecahan
Masalah

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan mengetahui penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dan standar akuntansi pemerintah memediasi hubungan antara kompetensi SDM dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil analisis pembahasan yang telah peneliti jelaskan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya kompetensi yang dimiliki sumber daya manusia, maka penerapan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) yang dihasilkan cenderung semakin baik. Hal ini memiliki makna bahwa dengan meningkatnya kompetensi sumber daya manusia, meliputi pengetahuan (*knowledge*), keahlian (*skill*) dan sikap (*attitude*) maka penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dapat mengalami peningkatan juga.
2. Meningkatnya kompetensi yang dimiliki sumber daya manusia, maka penerapan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) yang dihasilkan cenderung semakin baik. Hal ini memiliki makna bahwa dengan meningkatnya kompetensi sumber daya manusia yang meliputi pengetahuan dan keahlian terkait dengan pengakuan pendapatan, pengakuan belanja, prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasi, investasi, pengakuan dan penghapusan aset berwujud dan tidak berwujud, kontrak konstruksi, kebijakan kapitalisasi pengeluaran, kemitraan dengan pihak ketiga, biaya penelitian dan pengembangan, perhitungan persediaan, serta perhitungan dana cadangan dapat meningkatkan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah.
3. Meningkatnya kompetensi yang dimiliki sumber daya manusia, maka Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dihasilkan cenderung semakin berkualitas. Hal ini memiliki makna bahwa kompetensi sumber daya manusia, meliputi

pengetahuan (*knowledge*), keahlian (*skill*) dan sikap (*attitude*) dapat meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

4. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dapat meningkatkan kualitas LKPD. Hal ini memiliki makna bahwa dengan menerapkan SPIP berdasarkan lima unsur pengendalian yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantau yang tinggi akan menjamin tujuan organisasi tercapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, sehingga kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah akan mengalami peningkatan.
5. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah yang dilakukan dengan tepat dalam penyusunan laporan keuangan dapat meningkatkan kualitas LKPD. Hal ini memiliki makna bahwa penerapan SAP yang tinggi menjamin bahwa laporan keuangan yang disusun telah sesuai dengan standar yang berlaku dan memenuhi kriteria informasi keuangan yang berguna bagi penggunaannya, sehingga akan berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
6. Kompetensi yang dimiliki sumber daya manusia melalui peningkatan penerapan SPIP berdampak terhadap meningkatnya kualitas LKPD. Hal ini memiliki makna bahwa kompetensi SDM yang tinggi dalam penerapan SPIP, maka kesalahan dalam hal pencatatan atau penilaian aset dapat terdeteksi sejak awal periode akuntansi sehingga dapat meminimalisir kekeliruan pencatatan, penyimpangan maupun faktor ketidakpatuhan terhadap peraturan, sehingga laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan akan semakin berkualitas.
7. Kompetensi yang dimiliki sumber daya manusia melalui penerapan SAP yang semakin baik akan berdampak terhadap meningkatnya kualitas LKPD. Hal ini memiliki makna bahwa kompetensi yang dimiliki sumber daya manusia meliputi pengetahuan dan keahlian dalam memahami prinsip-prinsip akuntansi yang tertuang dalam Standar Akuntansi Pemerintah dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

5.2 Keterbatasan

Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan yang dapat menjadi sumber bagi peneliti selanjutnya. Adapun keterbatasan-keterbatasan yang ditemukan dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada PPK-SKPD di Pemkab Situbondo, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasikan ke semua obyek (Pemkab).
2. Penelitian ini dilakukan dengan metode survei melalui kuesioner, sehingga adanya kemungkinan para responden untuk memberikan skor jawaban yang lebih tinggi terhadap skor jawaban yang sebenarnya terjadi sehingga responden tidak menjawab dengan benar.
3. Pengujian kualitas LKPD, variabel yang digunakan pada penelitian ini hanya kompetensi SDM, penerapan SPIP, penerapan SAP.

5.3 Saran

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memotivasi peneliti yang akan datang untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan kesimpulan, keterbatasan dalam penelitian ini, maka saran peneliti antara lain:

Saran bagi penelitian yang akan datang

1. Peneliti selanjutnya dapat memperluas wilayah penelitian di daerah lain, serta subyek yang dijadikan sebagai responden jangan hanya dilihat pada pandangan Pejabat Penatausahaan Keuangan-SKPD tetapi juga dari sudut pandang lain yang berhubungan dengan laporan keuangan pemerintah daerah seperti auditor.
2. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan model penelitian yang berbeda, seperti metode wawancara. Sehingga peneliti dapat mengetahui secara langsung situasi dan kondisi responden saat mengisi kuisisioner, serta dapat terlibat secara langsung dengan aktivitas yang ada dalam instansi tersebut.
3. Peneliti selanjutnya juga dapat menggunakan atau menambah variabel lain dalam penelitian sejenis. Variabel yang mungkin dapat digunakan yaitu sistem akuntansi keuangan daerah, dll.

Saran bagi pemerintah daerah Kabupaten Situbondo

Pemerintah Kabupaten Situbondo disarankan untuk dapat meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pemberian pendidikan dan pelatihan mengenai penatausahaan keuangan.



DAFTAR PUSTAKA

- Adhi dan Suhardjo. 2013. Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan dan kualitas aparatur pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Tual).Jurnal STIE Semarang.Vol.5,No.3
- Baron dan Armstrong. 2013. *Human Capital Management Konsep dan Implementasi* . Jakarta : Penerbit PPM.
- Belkaoui. 2000. *Teori Akuntansi*. Jakarta : Salemba Empat.
- BPK-RI.Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2016.
- Fikri,dkk. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan,Kompetensi Aparatur dan peran audit internal terhadap kualitas informasi laporan keuangan dengan system pengendalian intern sebagai variabel moderating (Studi Empiris pada SKPD-SKPD di Pemprov. NTB). Simposium Nasional Akuntansi XVIII
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Edisi Keenam.Semarang : Badan Penerbit UNDIP.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23. Edisi Kedelapan*. Semarang :Badan Penerbit UNDIP.
- Ihsanti, E. 2014. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah(Studi Empiris pada SKPD Kab. Lima Puluh Kota).Universitas Negeri Padang.
- Indriantoro,Nur dan Supomo, Bambang. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*. Edisi Pertama. Yogyakarta : BPFY-Yogyakarta.
- Indriasih, D. 2014. The Effect of Government Apparatus Competence and the Effectiveness of Government Internal Control Toward the Quality of Financial Reporting in Local Government. *Research Journal of Finance and Accounting*. Vol.5, No.20 ISSN 2222-2847
- Irwan, D. 2011. Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Provinsi

Sumatera Barat. Tesis. Universitas Negeri Padang. Kota Padang.

Komaruddin, Yusup. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi penelitian pada Instansi Pemerintah Kota Bandung). Fakultas Ekonomi Universitas computer Indonesia

Machmillan, G. 2003. *Improving Government Financial Reporting: The Windows to Good Governance. The Governanse Brief.*
(<https://www.adb.org/publications/improving-government-financial-reporting-window-good-governance>) [4/11/2016]

Mahmudi. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Ketiga.* Yogyakarta: UPP STIM YKPN

Marwansyah. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia.* Bandung: Alfabeta.

Noerdiawan. 2009. *Akuntansi Pemerintahan.* Jakarta: Salemba Empat

Nurillah, A.S. 2014. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Studi Empiris Pada SKPD Kota Depok. Universitas Diponegoro

Prayitno, D. 2010. *Paham Analisa Data Statistik Dengan SPSS.* Yogyakarta: MediaKom.

_____. *Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.*

_____. *Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah.*

_____. *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.*

_____. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.*

_____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara*

- Rahayu,dkk.2014.Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM),Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Terhadap Kualitas Laporan keuangan Pada Pemerintah Provinsi Riau (Studi Empiris Pada SKPD Provinsi Riau). JOM FEKOM.Vol 1 Nomor 2.
- Riswanto,Natak. 2016. Analisis pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten jember. Skripsi. Universitas Jember.
- Robbins,Stephen. 2016. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sari,Diana.2012. Pengaruh pengendalian intern terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah daerah.ISSN-2252-3936.
- Sedarmayanti. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung: Refika Aditama.
- Setiawati, E. dan Sari, S.P. 2014. Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Ditinjau Dari Sumber Daya Manusia, Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pemahaman Akuntansi (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Wilayah Eks Karesidenan Surakarta). Jurnal Seminar Nasional dan Call For Paper UMS. ISBN: 978-602-70429-2-6
- Sudarmanto. 2010. *Statistik Terapan Berbasis Komputer Dengan Program IBM SPSS Statistic*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sudiarianti, N. M. 2015. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Standar Akuntansi Pemerintah Serta Implikasinya Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Simposium Nasional Akuntansi XVIII
- Sudjana. 2005. *Metode Statistik*. Bandung: Tarsito.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Penerbit Alfabeta.
- Sukmaningrum, Harto. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Semarang).

Supriyadi, Edy. 2014. *SPSS + AMOS*. Jakarta : Penerbit IN MEDIA.

Susilawati dan Riana, D.S. 2014. Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern sebagai Anteseden Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal STIE STEMBI Bandung*.

Syarifudin,Akhmad. 2014. Pengaruh Kompetensi SDM dan Peran Audit Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Studi Empiris pada Pemkab Kebumen).*Jurnal Fokus Bisnis*. Vol.14,No 02.

Winidyaningrum dan Rahmawati. 2010. Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan Kepatwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi (Studi Empiris di Pemda Subosukawonosraten). *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XIII*

www.bpk.go.id (diakses pada 20 Oktober 2016)

www.situbondokab.go.id (diakses pada 25 Oktober 2016)

Zeyn, E., 2011. Pengaruh *Good Governance* dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Keuangan dengan Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*. Vol.1, No. 1. Hal: 21-37

Zuliarti. 2012. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia,Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah (Studi pada Pemerintah Kabupaten Kudus).Universitas Muria Kudus.

LAMPIRAN I.

Kuesioner Penelitian

**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA PADA PENERAPAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAN STANDAR
AKUNTANSI PEMERINTAH SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Pada Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD Di Kabupaten Situbondo)**

IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama :
2. Pangkat/ Gol. :
3. Instansi :
4. Jenis Kelamin*) : Pria/Wanita
5. Jabatan : PPK-SKPD
6. Lama Menjabat :
7. Pendidikan Terakhir*): D3/D4/S1/S2/S3 Jurusan.....
8. Pernahkah Bapak/Ibu/Sdr. membuat Laporan Keuangan?*) :Pernah/Tidak Pernah

*) Coret yang tidak sesuai

PERTANYAAN TENTANG KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH

CARA PENGISIAN KUESIONER

Mohon Bpk/ Ibu/ Sdr. memberi tanda check list/centang (v) pada salah satu pilihan jawaban yang tersedia dalam kolom pernyataan dengan kriteria sebagai berikut :

SS = Sangat Setuju

S = Setuju

N = Netral

TS = Tidak Setuju

STS = Sangat Tidak Setuju

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
A.	Relevan					
1.	Laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.					
2.	Informasi dalam Laporan keuangan yang dihasilkan dapat digunakan untuk mengoreksi keputusan pengguna dimasa lalu (<i>feedback value</i>).					
3.	Informasi dalam Laporan keuangan yang dihasilkan dapat digunakan sebagai alat untuk memprediksi kejadian masa yang akan datang (<i>predictive value</i>)					
4.	Laporan Keuangan disajikan secara tepat waktu sehingga dapat digunakan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan saat ini.					
5.	Informasi dalam laporan keuangan dibuat secara lengkap yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat digunakan dalam mengambil keputusan.					
B.	Andal					
6.	Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan SKPD telah menggambarkan dengan jujur transaksi dan peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan.					
7.	Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan SKPD bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang bersifat material.					

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
8.	Informasi yang disajikan oleh SKPD teruji kebenarannya.					
9.	Informasi yang dihasilkan dalam laporan keuangan SKPD telah memenuhi kebutuhan para pengguna dari laporan keuangan pemerintah.					
10.	Informasi yang dihasilkan dalam laporan keuangan SKPD tidak berpihak pada kepentingan pihak tertentu					
C.	Dapat Dibandingkan					
11.	Informasi yang termuat dalam laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya					
12.	SKPD menggunakan kebijakan akuntansi yang berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan					
13.	SKPD menggunakan kebijakan akuntansi yang sama dari tahu ketahun.					
D.	Dapat Dipahami					
14.	Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan SKPD secara jelas sehingga dapat dipahami oleh pengguna					
15.	Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan SKPD disajikan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna					
16.	Laporan Keuangan disusun secara sistematis sehingga mudah dimengerti.					

**PERTANYAAN TENTANG KOMPETENSI SUMBER DAYA
MANUSIA**

CARA PENGISIAN KUESIONER

Mohon Bpk/ Ibu/ Sdr. memberi tanda check list/centang (v) pada salah satu pilihan jawaban yang tersedia dalam kolom pernyataan dengan kriteria sebagai berikut :

SS = Sangat Setuju

TS = Tidak Setuju

S = Setuju

STS = Sangat Tidak Setuju

N = Netral

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
A.	Pengetahuan (<i>Knowledge</i>)					
1.	Saya memahami tugas pokok, fungsi dan uraian tugas sebagai Pejabat penatausahaan keuangan dengan baik.					
2.	Saya memiliki pemahaman teknis pekerjaan yang dilakukan dengan baik.					
3.	Saya memahami siklus akuntansi dengan baik					
4.	Saya memahami Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dengan baik					
5.	Saya sering membaca literatur berupa jurnal akuntansi dan buku-buku akuntansi dalam rangka meng- <i>Upgrade</i> pengetahuan Saya dibidang akuntansi.					
6.	Saya memahami Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah dengan baik					
7.	Saya memahami Peraturan Bupati Situbondo Nomor 13 tahun 2014 tentang kebijakan akuntansi berbasis akrual pada Pemerintah Kabupaten Situbondo.					
B.	Keahlian (<i>Skill</i>)					
8.	Saya mampu melakukan proses akuntansi (sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan) dengan menggunakan sistem/secara komputerisasi.					
9.	Saya mampu mengoperasikan SIRKA (Sistem Informasi Perencanaan dan Keuangan Akrual) dengan baik.					
10	Saya mampu input data atau transaksi ke sistem informasi (SIRKA) dengan tidak terjadi kesalahan dalam penentuan rekening.					

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
11	Saya mampu menyusun dan menyajikan Neraca menggunakan SIRKA dengan baik					
12.	Saya mampu menyusun dan menyajikan laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas menggunakan SIRKA dengan baik					
13.	Saya mampu menyusun dan menyajikan Catatan atas laporan keuangan dengan baik.					
14.	Saya mengikuti pelatihan terkait dengan penatausahaan laporan keuangan.					
C.	Perilaku (<i>Attitude</i>)					
15.	Saya menolak setiap intervensi dari atasan yang dapat menimbulkan pelanggaran terhadap peraturan.					
16.	Saya selalu bekerja berdasarkan praktik yang dapat diterima secara umum					
17.	Saya selalu memberikan keteladanan kepada bawahan dalam bersikap dan bertingkah laku sebagai seorang PPK.					
18.	Saya selalu menolak setiap gratifikasi yang berhubungan dengan tugas dan tanggungjawab sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan.					
19.	Saya mendukung penerapan prinsip-prinsip akuntansi dan estimasi yang konservatif					

**PERTANYAAN TENTANG PENERAPAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
(SPIP)**

CARA PENGISIAN KUESIONER

Mohon Bpk/ Ibu/ Sdr. memberi tanda check list/centang (v) pada salah satu pilihan jawaban yang tersedia dalam kolom pernyataan dengan kriteria sebagai berikut :

SS = Sangat Setuju TS = Tidak Setuju
S = Setuju STS = Sangat Tidak Setuju
N = Netral

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
A.	Lingkungan Pengendalian					
1.	Saya menerapkan aturan mengenai prilaku dan standar etika pegawai.					
2.	Saya mengetahui standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada posisi yang telah ditetapkan dalam instansi.					
3.	Struktur organisasi beserta tata laksananya telah menggambarkan pembagian kewenangan dan tanggung jawab pegawai.					
4	Wewenang yang saya terima sesuai dengan tingkat tanggungjawab dalam rangka pencapaian tujuan Instansi Pemerintah					
5.	Saya menerima tindakan disiplin apabila melakukan pelanggaran kebijakan, prosedur, atau aturan perilaku.					

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
6.	Dalam hal peningkatan kompetensi, saya mengikuti pelatihan dan pembimbingan terkait dengan penatausahaan laporan keuangan.					
7.	Saya telah melakukan mekanisme saling uji (pencocokan data dengan unit kerja yang menangani anggaran dan perbendaharaan)					
B.	Penilaian Risiko					
8.	Pimpinan telah melakukan analisis risiko secara lengkap dan menyeluruh terhadap kemungkinan timbulnya pelanggaran terhadap sistem akuntansi.					
9.	Pimpinan selalu memiliki rencana pengelolaan atau mengurangi risiko pelanggaran terhadap sistem dan prosedur akuntansi.					
C.	Aktivitas Pengendalian					
10.	Semua transaksi yang dienti dan diproses kedalam komputer adalah seluruh transaksi yang telah diotorisasi.					
11.	Kebijakan dan prosedur pengamanan fisik atas asset telah ditetapkan dan diimplementasikan dengan baik.					
12.	Pengeluaran uang pada SKPD telah didokumentasikan pada bukti pengeluaran kas yang telah diberi nomor urut tercetak.					
13.	Akses atas sumber daya (aset, uang, dll) dan catatan (misal: SIRKA) telah dibatasi pada pegawai yang berwenang yang ditetapkan secara formal.					
14.	Instansi Pemerintah telah mengembangkan rencana untuk identifikasi dan pengamanan aset infrastuktur.					
15.	Peralatan dan persediaan disimpan ditempat yang diamankan secara fisik dan dilindungi dari kerusakan.					

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
16.	Identitas aset dilekatkan pada meubelair, peralatan dan inventaris kantor lainnya.					
D.	Informasi dan Komunikasi					
17.	Informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu dapat diakses oleh pegawai yang berkepentingan/terkait.					
18.	Informasi disediakan tepat waktu, memungkinkan untuk dilakukan tindakan korektif secara tepat.					
19.	Saluran komunikasi berkelanjutan, terbuka dan efektif dengan masyarakat, rekanan, dan Aparat pengawas intern dalam memberikan masukan signifikan.					
E.	Pemantauan					
20.	Sebagai tindak lanjut dari penilaian terhadap kualitas pengendalian intern, SKPD telah melakukan perbaikan pengendalian intern.					
21.	Selalu dilakukan tindak lanjut setiap hasil temuan dan saran yang diberikan oleh BPK/Inspektorat.					
22.	Selalu dilakukan revidu dan evaluasi temuan yang menunjukkan adanya kelemahan dan perlu perbaikan.					

**PERTANYAAN TENTANG PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAHAN (SAP)**

CARA PENGISIAN KUESIONER

Mohon Bpk/ Ibu/ Sdr. memberi tanda check list/centang (v) pada salah satu pilihan jawaban yang tersedia dalam kolom pernyataan dengan kriteria sebagai berikut :

SS = Sangat Setuju

TS = Tidak Setuju

S = Setuju

STS = Sangat Tidak Setuju

N = Netral

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
A.	PSAP No. 01 tentang Penyajian laporan keuangan					
1.	Saya selalu menerapkan basis akrual untuk mengakui asset					
2.	Saya selalu menerapkan basis akrual untuk mengakui pendapatan dan beban.					
3.	Saya selalu menerapkan basis akrual untuk mengakui kewajiban, dan ekuitas					
B.	PSAP No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran					
4.	Saya selalu menyusun dan menyajikan Laporan Realisasi Anggaran menggunakan akuntansi berbasis kas					
5.	Saya selalu mencatat pendapatan-LRA berdasarkan asas bruto.					
6.	Saya telah mengakui belanja saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah.					
7.	Penerimaan pembiayaan diakui ada saat diterima pada rekening kas umum daerah					
C.	PSAP No. 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan					
8.	Saya selalu menyajikan Catatan atas laporan keuangan pada setiap periode pelaporan.					

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
9.	Catatan atas laporan keuangan SKPD yang saya susun selalu menyajikan informasi secara lengkap tentang penjelasan pos-pos dalam laporan keuangan.					
D.	PSAP No. 05 tentang Akuntansi Persediaan					
10.	Saya selalu mengakui persediaan pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.					
11.	Pencatatan persediaan selalu saya laksanakan berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada akhir periode akuntansi.					
E.	PSAP No. 06 tentang Akuntansi Investasi					
12.	Saya selalu mengakui Kas yang telah dikeluarkan sebagai investasi setelah manfaat ekonomi potensi di masa yang akan datang diukur.					
13	Saya selalu menggunakan metode biaya untuk Penilaian investasi atas kepemilikan kurang dari 20%.					
14.	Saya selalu menggunakan metode ekuitas untuk penilaian investasi atas kepemilikan lebih dari 50%.					
15	menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan untuk penilaian investasi atas kepemilikan nonpermanen.					
F.	PSAP No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap					
16	Saya selalu mengklasifikasikan asset tetap berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam operasi entitas					
17	Saya selalu mencatat/ menilai aset tetap sebesar biaya perolehannya.					
G.	PSAP No. 08 tentang Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan					
18	Saya selalu mengungkapkan informasi mengenai konstruksi dalam pengerjaan pada akhir periode akuntansi					

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
19	Saya selalu memindahkan konstruksi dalam pengerjaan ke asset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.					
H.	PSAP No. 09 tentang Akuntansi Kewajiban					
20.	Saya selalu mengakui kewajiban pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.					
21.	Saya selalu mencatat kewajiban sebesar nilai nominal.					
I.	PSAP No. 10 tentang Koreksi Kesalahan					
22	Saya selalu melakukan koreksi terhadap setiap kesalahan yang ditemukan berdasarkan SAP					
23	Saya selalu mengoreksi kesalahan yang tidak berulang melalui pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan					
J.	PSAP No. 12 tentang Laporan Operasional					
24	Saya paham Laporan Operasional menyajikan informasi beban yang harus ditanggung untuk menjalankan pelayanan dan juga memprediksi pendapatan-LO yang akan diterima untuk membiayai kegiatan.					
25	Saya mengakui pendapatan-LO saat timbulnya hak atas pendapatan dan pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.					
26	Saya telah mengakui beban saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah, terjadinya konsumsi aset,serta terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.					

Lampiran 2

Lampiran Populasi

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo;
3. Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo;
4. Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo;
5. Dinas Pertanian Kabupaten Situbondo;
6. Dinas Peternakan Kabupaten Situbondo;
7. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo;
8. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Situbondo;
9. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Situbondo;
10. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Situbondo;
11. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Situbondo;
12. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Situbondo;
13. Dinas Sosial Kabupaten Situbondo;
14. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo;
15. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Situbondo;
16. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo;
17. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo;
18. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo;
19. Badan Kepegawaian Kabupaten Situbondo;
20. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo;
21. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kabupaten Situbondo;
22. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Situbondo;
23. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo;
24. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo;
25. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Situbondo;
26. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Situbondo;
27. Kantor Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo;

28. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdoer Rahem Kabupaten Situbondo;
29. Rumah Sakit Umum Daerah Asembagus Kabupaten Situbondo;
30. Rumah Sakit Umum Daerah Besuki Kabupaten Situbondo;
31. Inspektorat Kabupaten Situbondo;
32. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo;
33. Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo;
34. Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo;
35. Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo;
36. Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo;
37. Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo;
38. Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo;
39. Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo;
40. Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo;
41. Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo;
42. Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo;
43. Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo;
44. Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo;
45. Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo;
46. Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo;
47. Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo;
48. Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo;
49. Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo;

Lampiran 3. Rekapitulasi Jawaban Responden

Respon den	Kualitas LKPD (Y)																Kompetensi SDM (X)																					
	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	Y10	Y11	Y12	Y13	Y14	Y15	Y16	Σ	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14	X15	X16	X17	X18	X19	Σ	
1	4	3	4	3	3	4	5	5	4	5	5	4	5	4	5	4	67	4	3	4	3	3	4	3	5	4	5	3	3	4	5	3	4	4	4	4	4	72
2	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	70	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	4	5	5	4	4	4	4	4	86
3	5	5	3	4	4	4	4	3	3	3	4	3	4	4	4	4	61	5	5	3	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	5	4	4	3	4	3	4	72
4	4	4	5	4	3	4	3	5	3	3	4	4	4	4	5	5	3	63	4	4	5	4	3	4	3	5	3	3	4	3	4	4	4	3	3	3	4	70
5	4	3	3	3	3	3	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	57	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	67
6	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	66	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	77
7	5	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	75	5	4	4	4	4	4	5	5	5	5	3	3	3	4	4	5	5	4	5	81	
8	4	4	3	3	4	3	4	5	5	3	5	5	3	2	5	5	63	3	4	3	3	4	3	5	3	5	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	75	
9	4	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	69	3	3	3	3	3	3	5	4	5	5	3	4	4	3	4	5	5	5	4	74	
10	4	4	3	3	4	3	4	5	4	4	4	4	5	5	4	4	64	3	4	3	3	4	3	4	4	4	4	3	3	3	4	3	4	4	4	4	68	
11	5	5	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	70	5	5	4	5	5	5	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	83
12	5	5	4	3	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	75	5	5	4	3	4	4	4	4	5	5	4	3	3	4	3	5	5	5	5	80	
13	4	4	4	3	4	3	5	4	4	5	5	5	5	5	4	4	68	4	4	4	3	4	3	4	4	4	5	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	72
14	5	4	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	67	3	4	3	3	3	4	4	4	4	4	2	3	3	3	3	4	4	4	4	4	65
15	4	3	5	5	5	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	65	4	3	3	2	2	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	68
16	5	5	3	5	4	4	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	63	5	5	3	5	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	5	4	3	4	4	4	76
17	4	3	4	4	4	4	5	5	4	3	4	4	5	5	5	4	67	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	3	2	3	4	4	5	5	69
18	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	59	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	69
19	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	67	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	5	5	4	5	4	4	4	4	4	4	83
20	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	56	4	4	4	4	3	3	4	3	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	78
21	4	3	4	3	3	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	62	4	3	4	3	3	5	3	3	4	4	4	3	3	5	5	4	4	4	4	4	72
22	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	74	5	4	5	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	89
23	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	65	4	4	4	3	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	77
24	3	3	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	66	5	5	5	3	3	3	2	3	5	5	4	4	4	3	4	5	5	5	5	5	78

Respon den	SPIP (Z1)																						Σ
	Z1.1	Z1.2	Z1.3	Z1.4	Z1.5	Z1.6	Z1.7	Z1.8	Z1.9	Z1.10	Z1.11	Z1.12	Z1.13	Z1.14	Z1.15	Z1.16	Z1.17	Z1.18	Z1.19	Z1.20	Z1.21	Z1.22	
1	4	5	4	4	3	4	5	5	4	5	5	4	5	4	5	4	4	5	2	4	4	5	94
2	5	5	5	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	4	4	5	4	94
3	5	5	5	4	4	4	4	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	86
4	4	4	5	4	3	4	3	5	3	3	4	4	4	5	5	3	4	5	4	4	4	4	88
5	4	2	3	4	3	3	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	87
6	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	91
7	5	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	101
8	4	4	3	3	4	3	4	5	5	3	5	4	3	2	5	5	4	5	4	5	4	4	88
9	4	3	3	4	4	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5	99
10	4	4	3	3	4	3	4	5	4	4	4	4	5	5	4	4	5	3	3	3	3	3	84
11	5	5	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	96
12	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	104
13	4	4	4	4	4	3	5	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	5	4	4	94
14	5	4	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	95
15	4	5	5	5	5	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	4	96
16	5	5	3	5	4	4	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	3	3	3	5	3	3	83
17	4	5	4	4	4	4	5	5	4	3	4	4	5	5	5	4	4	3	4	5	5	4	94
18	4	3	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	3	5	5	86
19	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	91
20	3	4	3	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	5	3	3	4	4	4	81
21	4	3	4	3	3	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	84
22	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	5	5	4	5	5	5	5	5	4	5	4	4	99
23	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	3	4	4	89
24	3	4	5	4	3	3	3	5	4	4	5	4	5	5	5	5	4	5	4	3	4	4	91

Digital Repository Universitas Jember

25	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	85
26	4	3	4	4	3	3	4	3	3	3	4	4	4	5	4	4	3	5	3	3	3	4	80
27	4	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	3	3	3	4	94
28	5	4	4	4	4	5	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	5	5	4	5	5	5	92
29	4	4	5	4	4	3	5	5	4	4	5	4	3	5	5	5	4	5	5	5	5	5	98
30	5	5	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	4	5	5	4	4	5	96
31	4	4	3	4	4	4	5	5	4	5	5	4	4	4	5	4	4	5	4	5	4	3	93
32	5	5	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	3	2	4	4	91
33	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	5	3	3	3	82
34	5	4	4	4	5	4	5	5	3	3	4	4	4	5	5	3	5	5	3	4	4	4	92
35	4	5	5	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	5	5	91
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	3	3	3	4	4	86
37	5	5	5	4	5	4	5	5	4	4	5	4	5	5	5	5	3	3	2	4	4	4	95
38	5	5	5	5	4	5	1	5	5	3	4	5	4	5	3	5	5	5	3	4	4	2	92
39	5	5	5	5	4	5	5	3	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	104
40	4	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	5	4	4	5	5	4	5	4	4	95
41	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	3	3	3	3	85
42	5	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	5	5	5	4	101
43	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4	4	5	4	4	4	4	90

Respon den	SAP (Z2)																											
	Z2.1	Z2.2	Z2.3	Z2.4	Z2.5	Z2.6	Z2.7	Z2.8	Z2.9	Z2.10	Z2.11	Z2.12	Z2.13	Z2.14	Z2.15	Z2.16	Z2.17	Z2.18	Z2.19	Z2.20	Z2.21	Z2.22	Z2.23	Z2.24	Z2.25	Z2.26	Σ	
1	5	4	3	5	5	4	4	5	4	4	5	3	3	4	5	3	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	115
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	3	5	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	104
3	3	3	3	3	2	3	5	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	5	4	93	
4	5	4	4	5	4	4	4	5	4	4	5	4	3	4	4	4	3	4	3	3	4	4	4	3	4	4	103	
5	4	5	5	4	5	4	5	4	4	4	4	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	102	
6	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	100	
7	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	3	3	3	4	4	5	5	5	5	5	4	5	4	4	4	117	
8	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	3	4	4	4	4	4	4	5	4	5	5	3	4	5	4	116	
9	5	4	4	5	4	4	4	5	4	5	5	3	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	113	
10	5	4	4	5	3	5	3	5	4	4	4	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	5	4	4	5	5	105	
11	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	105	
12	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4	3	3	4	3	5	4	5	5	4	4	4	4	4	4	114	
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	3	3	3	3	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	103	
14	4	4	4	4	5	4	3	4	4	4	3	2	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	96	
15	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	105	
16	3	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	5	4	3	4	4	4	4	4	4	4	5	100	
17	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	3	3	3	5	3	5	4	4	3	4	4	4	4	5	5	113	
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	103	
19	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	5	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	106	
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	3	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	108	
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	103	
22	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	128	
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	104	
24	5	4	4	5	4	4	4	5	4	5	5	4	4	4	3	4	3	5	5	5	5	4	5	5	5	5	115	

Digital Repository Universitas Jember

25	4	4	3	4	2	3	3	4	3	4	4	3	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	98
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4	3	3	4	4	4	4	5	4	5	108
27	5	4	4	5	5	4	4	5	3	4	5	5	3	4	5	4	5	4	4	5	5	4	5	5	5	5	116
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	102
29	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	4	4	5	5	5	5	5	125
30	4	5	5	4	4	5	5	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	110
31	5	4	4	5	3	4	4	5	4	4	5	4	3	4	3	4	5	5	4	5	5	4	5	4	5	4	111
32	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	105
33	3	4	4	3	4	4	4	3	4	3	4	5	4	4	4	5	4	3	3	3	4	3	4	4	4	4	98
34	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	3	5	3	3	4	4	4	5	4	4	116
35	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	107
36	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	104
37	5	4	5	5	4	4	4	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	4	4	5	4	4	119
38	5	4	4	5	3	4	4	5	4	5	5	4	5	5	3	5	1	4	5	3	4	5	4	5	4	5	110
39	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	4	4	4	125
40	5	4	4	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	111
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	103
42	5	4	5	5	4	4	5	5	4	5	5	3	5	5	3	5	5	4	4	5	4	4	4	4	4	5	115
43	4	4	4	4	5	4	5	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	109

Lampiran 4. Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y1	43	3	5	4,33	,566
Y2	43	3	5	4,00	,787
Y3	43	3	5	3,84	,688
Y4	43	3	5	3,81	,732
Y5	43	3	5	3,98	,740
Y6	43	3	5	3,95	,785
Y7	43	1	5	4,26	,759
Y8	43	2	5	4,26	,790
Y9	43	3	5	4,14	,639
Y10	43	3	5	4,12	,731
Y11	43	3	5	4,30	,513
Y12	43	3	5	4,26	,539
Y13	43	3	5	4,33	,606
Y14	43	2	5	4,37	,618
Y15	43	3	5	4,28	,630
Y16	43	3	5	4,26	,539
X1	43	3	5	4,30	,674
X2	43	3	5	4,12	,697
X3	43	3	5	4,00	,724
X4	43	2	5	3,91	,811
X5	43	2	5	3,91	,781
X6	43	3	5	3,98	,707
X7	43	2	5	4,14	,743
X8	43	3	5	4,21	,675
X9	43	3	5	4,14	,639
X10	43	3	5	4,12	,731
X11	43	2	5	4,02	,831
X12	43	3	5	3,98	,801
X13	43	3	5	3,93	,669
X14	43	2	5	4,33	,715
X15	43	3	5	4,16	,688
X16	43	3	5	4,26	,539

X17	43	3	5	4,19	,627
X18	43	3	5	4,23	,527
X19	43	3	5	4,23	,571
Z1.1	43	3	5	4,33	,566
Z1.2	43	2	5	4,26	,727
Z1.3	43	3	5	4,09	,648
Z1.4	43	3	5	4,02	,597
Z1.5	43	3	5	4,00	,655
Z1.6	43	3	5	3,95	,785
Z1.7	43	1	5	4,26	,759
Z1.8	43	2	5	4,26	,790
Z1.9	43	3	5	4,05	,575
Z1.10	43	3	5	3,98	,636
Z1.11	43	3	5	4,30	,513
Z1.12	43	3	5	4,05	,375
Z1.13	43	3	5	4,19	,546
Z1.14	43	2	5	4,37	,618
Z1.15	43	3	5	4,28	,630
Z1.16	43	3	5	4,26	,539
Z1.17	43	3	5	4,26	,693
Z1.18	43	3	5	4,44	,765
Z1.19	43	2	5	3,95	,844
Z1.20	43	2	5	4,12	,793
Z1.21	43	3	5	4,12	,625
Z1.22	43	2	5	4,05	,688
z2.1	43	3	5	4,35	,613
z2.2	43	3	5	4,21	,466
z2.3	43	3	5	4,23	,571
z2.4	43	3	5	4,40	,623
z2.5	43	2	5	3,98	,707
z2.6	43	3	5	4,21	,514
z2.7	43	3	5	4,21	,600
z2.8	43	3	5	4,37	,618
z2.9	43	3	5	4,12	,544
z2.10	43	3	5	4,26	,539
z2.11	43	3	5	4,40	,541
z2.12	43	2	5	3,95	,815

z2.13	43	3	5	3,98	,771
z2.14	43	3	5	3,98	,636
z2.15	43	3	5	4,09	,718
z2.16	43	3	5	4,09	,684
z2.17	43	1	5	4,14	,743
z2.18	43	3	5	4,12	,544
z2.19	43	3	5	4,05	,532
Z2.20	43	3	5	4,23	,718
Z2.21	43	4	5	4,23	,427
Z2.22	43	3	5	4,09	,426
Z2.23	43	3	5	4,14	,467
Z2.24	43	3	5	4,19	,546
Z2.25	43	3	5	4,23	,480
Z2.26	43	3	5	4,21	,514
Valid N (listwise)	43				

Lampiran 5. Uji Validitas dan Reabilitas

a. Uji Validitas

		Correlations															kualita s LKPD		
		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	Y10	Y11	Y12	Y13	Y14	Y15	Y16		
Y1	Pearson Correlatio n Sig. (2- tailed) N	1	,642* *	,446* *	,610* *	,588* *	,678* *	,079	,022	,003	-,094	-,183	,033	-,039	-,014	,006	,111	,426**	
			,000	,003	,000	,000	,000	,616	,887	,984	,550	,240	,835	,805	,928	,968	,479	,004	
		43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
Y2	Pearson Correlatio n Sig. (2- tailed) N	,642* *	1	,264	,579* *	,614* *	,539* *	,000	,077	,142	,000	-,059	,000	,000	,049	,000	,225	,501**	
		,000		,087	,000	,000	,000	1,00 0	,625	,364	1,00 0	,707	1,00 0	1,00 0	,755	1,00 0	,147	,001	
		43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
Y3	Pearson Correlatio n Sig. (2- tailed)	,446* *	,264	1	,601* *	,507* *	,559* *	-,101	,166	,053	-,009	-,060	,244	,244	,202	-,003	-,013	,482**	
		,003	,087		,000	,001	,000	,520	,287	,736	,955	,704	,115	,114	,194	,987	,932	,001	

Y16	Pearson																	
	Correlation	,111	,225	-,013	,124	,135	,029	,127	,290	,862*	,528*	,575*	,672*	,322*	,136	,276	1	,674**
	Sig. (2-tailed)	,479	,147	,932	,430	,389	,855	,416	,059	,000	,000	,000	,000	,035	,383	,073		,000
	N	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
kualitas LKD	Pearson																	
	Correlation	,426*	,501*	,482*	,431*	,507*	,473*	,333*	,507*	,711*	,629*	,528*	,644*	,547*	,367*	,451*	,674*	1
	Sig. (2-tailed)	,004	,001	,001	,004	,001	,001	,029	,001	,000	,000	,000	,000	,000	,015	,002	,000	
	N	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

z1.	Pearson	-	-	-	-	-	-	,43	,06	,11	,32	,29	,08	,16	,01	,24	,16	,12	,23	,45	-	,59	1	,389
22	Correlation	,04	,26	,01	,17	,15	,12	2**	5	5	9*	6	4	7	4	4	0	4	1	5**	,01	6**	1	**
	Sig. (2-tailed)	,80	,08	,95	,25	,31	,41	,00	,67	,46	,03	,05	,59	,28	,92	,11	,30	,42	,13	,00	,94	,00		,010
	N	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
SPI	Pearson	,41	,32	,33	,41	,39	,34	,45	,49	,53	,50	,54	,34	,38	,33	,51	,54	,35	,42	,40	,35	,48	,38	1
P	Correlation	3**	5*	4*	3**	2**	3*	2**	9**	5**	0**	4**	6*	7*	9*	6**	9**	2*	5**	3**	0*	1**	9**	
	Sig. (2-tailed)	,00	,03	,02	,00	,00	,02	,00	,00	,00	,00	,00	,02	,01	,02	,00	,00	,02	,00	,00	,02	,00	,01	
	N	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Z2.24	Pearson Correlatio	,371*	,124	,087	,409**	,073	,197	,096	,425**	,166	,320*	,390**	,287	,350*	,493**	,380*	,335*	,052	,326*	,133	,251	,320*	,333*	,550**	1	,376*	,536**	,617**	
	Sig. (2-tailed)	,014	,428	,579	,006	,641	,205	,539	,004	,287	,036	,010	,062	,021	,001	,012	,028	,741	,033	,394	,104	,036	,029	,000		,013	,000	,000	
	N	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
Z2.25	Pearson Correlatio	,284	-,010	-,115	,243	-,194	,184	,075	,263	,076	,041	,371*	-,093	-,114	,096	,143	,005	,241	,076	,236	,116	,310*	,357*	,383*	,376*	1	,473**	,319*	
	Sig. (2-tailed)	,065	,950	,462	,117	,212	,238	,633	,088	,626	,796	,014	,551	,468	,540	,360	,974	,120	,626	,127	,460	,043	,019	,011	,013		,001	,037	
	N	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
Z2.26	Pearson Correlatio	,518**	,111	,074	,479**	,079	,190	,163	,498**	,081	,232	,466**	,081	,193	,306**	,268	,146	,046	,081	,137	,123	,098	,452**	,470**	,536**	,473**	1	,523**	
	Sig. (2-tailed)	,000	,479	,639	,001	,614	,221	,296	,001	,605	,135	,002	,608	,216	,046	,082	,349	,768	,605	,379	,433	,531	,002	,001	,000	,001		,000	
	N	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
SAP	Pearson Correlatio	,712**	,629**	,607**	,774**	,344*	,629**	,514**	,787**	,610**	,702**	,791**	,341*	,311*	,411**	,317*	,315*	,392**	,655**	,392**	,528**	,464**	,477**	,436**	,617**	,319*	,523**	1	
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,024	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,025	,042	,006	,038	,040	,009	,000	,009	,000	,002	,001	,003	,000	,037	,000		
	N	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

b. Uji Reliabilitas

Y

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	43	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	43	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,822	16

X

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	43	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	43	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,867	19

Z1

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	43	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	43	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,770	22

Z2

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	43	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	43	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,883	26

Lampiran 6. Uji Asumsi Klasik

a. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual	
N		43	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000	
	Std. Deviation	2,78741420	
Most Extreme Differences	Absolute	,116	
	Positive	,106	
	Negative	-,116	
Test Statistic		,116	
Asymp. Sig. (2-tailed)		,168 ^c	
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	,567 ^d	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	,554
		Upper Bound	,580

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.

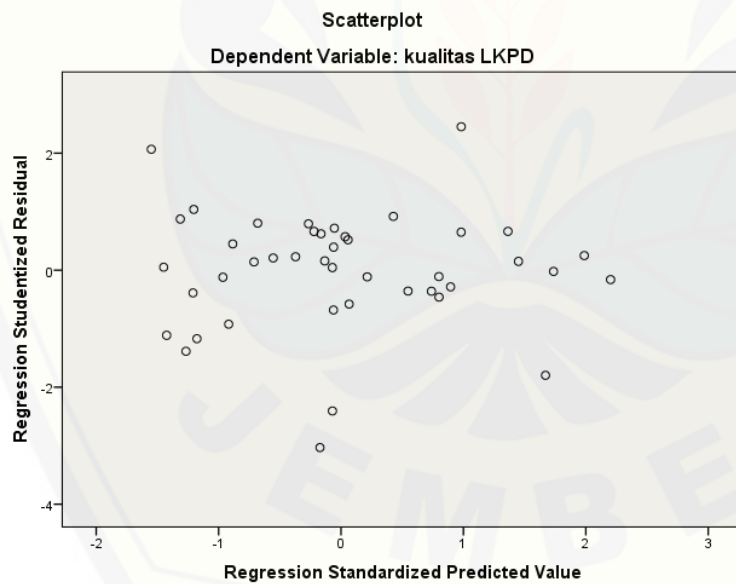
b. Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-14,060	7,317		-1,921	,062		
Kompetensi SDM	,281	,078	,350	3,619	,001	,633	1,580
SAP	-,040	,083	-,054	-,483	,632	,469	2,131
SPIP	,685	,095	,712	7,227	,000	,611	1,637

a. Dependent Variable: kualitas LKPD

c. Uji Heteroskedastisitas



Lampiran 7. Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1085,348	3	361,783	43,237	,000 ^b
	Residual	326,326	39	8,367		
	Total	1411,674	42			

a. Dependent Variable: kualitas LKPD

b. Predictors: (Constant), SPIP, Kompetensi SDM, SAP

Lampiran 8. Uji t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	27,793	7,759		3,582	,001
	Kompetensi SDM	,492	,099	,614	4,975	,000

a. Dependent Variable: kualitas LKPD

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	64,461	9,292		6,937	,000
	Kompetensi SDM	,347	,118	,416	2,928	,006

a. Dependent Variable: SPIP

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	57,046	10,644		5,359	,000
	Kompetensi SDM	,658	,136	,604	4,849	,000

a. Dependent Variable: SAP

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-6,302	7,810		-,807	,424
	SPIP	,792	,085	,824	9,307	,000

a. Dependent Variable: kualitas LKPD

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	18,365	9,998		1,837	,073
	SAP	,441	,092	,600	4,800	,000

a. Dependent Variable: kualitas LKPD

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-14,831	7,073		-2,097	,042
	Kompetensi SDM	,263	,067	,328	3,907	,000
	SPIP	,661	,081	,688	8,201	,000

a. Dependent Variable: kualitas LKPD

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	12,638	9,539		1,325	,193
	Kompetensi SDM	,317	,117	,396	2,712	,010
	SAP	,266	,107	,361	2,475	,018

a. Dependent Variable: kualitas LKPD

Lampiran 9. R tabel

N	The Level of Significance		N	The Level of Significance	
	5%	1%		5%	1%
3	0.997	0.999	38	0.320	0.413
4	0.950	0.990	39	0.316	0.408
5	0.878	0.959	40	0.312	0.403
6	0.811	0.917	41	0.308	0.398
7	0.754	0.874	42	0.304	0.393
8	0.707	0.834	43	0.301	0.389
9	0.666	0.798	44	0.297	0.384
10	0.632	0.765	45	0.294	0.380
11	0.602	0.735	46	0.291	0.376
12	0.576	0.708	47	0.288	0.372
13	0.553	0.684	48	0.284	0.368
14	0.532	0.661	49	0.281	0.364
15	0.514	0.641	50	0.279	0.361
16	0.497	0.623	55	0.266	0.345
17	0.482	0.606	60	0.254	0.330
18	0.468	0.590	65	0.244	0.317
19	0.456	0.575	70	0.235	0.306
20	0.444	0.561	75	0.227	0.296
21	0.433	0.549	80	0.220	0.286
22	0.432	0.537	85	0.213	0.278
23	0.413	0.526	90	0.207	0.267
24	0.404	0.515	95	0.202	0.263
25	0.396	0.505	100	0.195	0.256
26	0.388	0.496	125	0.176	0.230
27	0.381	0.487	150	0.159	0.210
28	0.374	0.478	175	0.148	0.194
29	0.367	0.470	200	0.138	0.181
30	0.361	0.463	300	0.113	0.148
31	0.355	0.456	400	0.098	0.128
32	0.349	0.449	500	0.088	0.115
33	0.344	0.442	600	0.080	0.105
34	0.339	0.436	700	0.074	0.097
35	0.334	0.430	800	0.070	0.091
36	0.329	0.424	900	0.065	0.086
37	0.325	0.418	1000	0.062	0.081

Lampiran 10. T tabel

Pr \ df	0.25 0.50	0.10 0.20	0.05 0.10	0.025 0.050	0.01 0.02	0.005 0.010	0.001 0.002
41	0.68052	1.30254	1.68288	2.01954	2.42080	2.70118	3.30127
42	0.68038	1.30204	1.68195	2.01808	2.41847	2.69807	3.29595
43	0.68024	1.30155	1.68107	2.01669	2.41625	2.69510	3.29089
44	0.68011	1.30109	1.68023	2.01537	2.41413	2.69228	3.28607
45	0.67998	1.30065	1.67943	2.01410	2.41212	2.68959	3.28148
46	0.67986	1.30023	1.67866	2.01290	2.41019	2.68701	3.27710
47	0.67975	1.29982	1.67793	2.01174	2.40835	2.68456	3.27291
48	0.67964	1.29944	1.67722	2.01063	2.40658	2.68220	3.26891
49	0.67953	1.29907	1.67655	2.00958	2.40489	2.67995	3.26508
50	0.67943	1.29871	1.67591	2.00856	2.40327	2.67779	3.26141
51	0.67933	1.29837	1.67528	2.00758	2.40172	2.67572	3.25789
52	0.67924	1.29805	1.67469	2.00665	2.40022	2.67373	3.25451
53	0.67915	1.29773	1.67412	2.00575	2.39879	2.67182	3.25127
54	0.67906	1.29743	1.67356	2.00488	2.39741	2.66998	3.24815
55	0.67898	1.29713	1.67303	2.00404	2.39608	2.66822	3.24515
56	0.67890	1.29685	1.67252	2.00324	2.39480	2.66651	3.24226
57	0.67882	1.29658	1.67203	2.00247	2.39357	2.66487	3.23948
58	0.67874	1.29632	1.67155	2.00172	2.39238	2.66329	3.23680
59	0.67867	1.29607	1.67109	2.00100	2.39123	2.66176	3.23421
60	0.67860	1.29582	1.67065	2.00030	2.39012	2.66028	3.23171
61	0.67853	1.29558	1.67022	1.99962	2.38905	2.65886	3.22930
62	0.67847	1.29536	1.66980	1.99897	2.38801	2.65748	3.22696
63	0.67840	1.29513	1.66940	1.99834	2.38701	2.65615	3.22471
64	0.67834	1.29492	1.66901	1.99773	2.38604	2.65485	3.22253
65	0.67828	1.29471	1.66864	1.99714	2.38510	2.65360	3.22041
66	0.67823	1.29451	1.66827	1.99656	2.38419	2.65239	3.21837
67	0.67817	1.29432	1.66792	1.99601	2.38330	2.65122	3.21639
68	0.67811	1.29413	1.66757	1.99547	2.38245	2.65008	3.21446